



LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
TAHUN 2023

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah laporan pertanggungjawaban kinerja bagi setiap SKPD Kabupaten Kepulauan Selayar.

LAKIP ini disusun mengacu pada Pedoman Penyusunan LAKIP sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, sebagai salah satu komponen laporan pertanggungjawaban yang diharapkan dapat menggambarkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selama tahun anggaran 2022.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami hingga tersusunnya (LAKIP) Tahun 2023, semoga bermanfaat dan berguna untuk pelaksanaan tugas-tugas dan semakin memacu kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang akan datang. Namun kami menyadari dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan pendapat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan ini.

Demikian LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini disusun dengan harapan dapat menjadi salah satu acuan dalam penyusunan LAKIP Kabupaten Kepulauan Selayar.

Benteng, 06 Februari 2023

**KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,**

Drs. AHMAD ANSAR, M. Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19730406 199203 1 002

ABSTRAK

Ditinjau dari aspek geografis, tofografis maupun demografis, Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan kabupaten dengan tingkat kerawanan bencana yang relatif tinggi. Potensi bencana yang dapat terjadi, antara lain, berupa Tsunami, Kecelakaan laut, Angin kencang, Erosi / Abrasi pantai dan banjir ataupun bencana non alam dan Sosial lainnya. Diantara berbagai potensi bencana yang ada, yang paling sering terjadi adalah terjangan angin kencang (angin puting beliung, abrasi, gelombang air pasang, dan kecelakaan laut). Kondisi dan dinamika demografis juga dapat menimbulkan bencana yang dapat mengakibatkan kerugian jiwa maupun harta benda. Bencana alam dimaksud telah menimbulkan hambatan bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar pada khususnya maupun pembangunan regional dan nasional pada umumnya. Bencana alam dapat pula menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa yang dalam keadaan tertentu dapat menjadi beban dan mengganggu jalannya roda pembangunan daerah.

Oleh karena itu, Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan sendirinya harus dikelola dan ditangani secara baik melalui upaya terencana, terpadu dan terkoordinasi antara pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat, dengan memberdayakan semaksimal mungkin potensi sumber daya lokal yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kepulauan Selayar yang pembentukannya sekaligus dalam rangka pelaksanaan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2008 dan telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 30 Oktober 2010 dengan tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, tanggap darurat dan

pasca bencana dan sekaligus mempunyai fungsi koordinasi, fungsi komando dan fungsi pelaksana.

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dirumuskan dengan memperhatikan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Kepulauan Selayar yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026 yaitu **“Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”**,

Sebagai salah satu komponen dari Perencanaan Strategis, Visi yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi juga merupakan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur.

Pernyataan visi tersebut dilandasi pada tugas pokok dan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu :

1. Bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang penanggulangan bencana;
2. Bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki kewenangan pengendalian bencana pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

Didalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah menghadapi beberapa kendala atau tantangan sebagai berikut:

- a. Semakin meningkatnya tuntutan dan kritisnya masyarakat terhadap peningkatan pelayanan pemerintah.
- b. Sebagian besar wilayah yang berpotensi terjadi bencana
- c. Upaya Mitigasi Bencana yang belum memadai
- d. Pemanfaatan lahan yang berlebihan dan belum terencana dengan baik
- e. Belum adanya masterplant penanggulangan bencana yang menyeluruh
- f. Masih rendahnya SDM Staf BPBD dalam manajemen penanggulangan bencana

Masih kurangnya pemahaman dan kepedulian serta keterlibatan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana

Disamping tantangan yang dihadapi terdapat pula peluang sebagai berikut :

- a. Adanya sistem regulasi yang memadai yang menjadi dasar hukum untuk mendukung kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- b. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dan canggih yang dapat mendukung peningkatan kualitas penanganan bencana
- c. Adanya tren peningkatan alokasi anggaran setiap tahun baik itu bersumber dari APBD, APBN (DAK) maupun anggaran dari BNPB
- d. Pelatihan SDM Untuk Peningkatan Keterampilan

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum OPD	3
D. Isu – Isu Strategis	32
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	34
B. Indikator Kinerja Utama	44
C. Rencana Kerja Tahunan	46
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	52
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja	53
B. Analisis Capaian Kinerja	55
C. Realisasi Keuangan	58
BAB IV : PENUTUP	72
LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabuapten Kepulauan Selayar diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud laporan ini disusun dengan maksud memberikan gambaran capaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.

Adapun tujuannya adalah untuk mengukur kinerja Bupati tahun 2022 dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.

C. Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1. Dasar Hukum Pembentukan SKPD

- a. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- b. Undang – Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- e. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2008;

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. Struktur Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 78 Tahun 2020 tanggal 14 Desember 2020, mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana dan sekaligus mempunyai fungsi pengordinasian, pengkomandoan dan pelaksana dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- 1) Kepala Pelaksana Badan
- 2) Sekretariat, meliputi :
 - a. Subbagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan
 - c. Subbagian Keuangan
- 3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pencegahan, dan
 - b. Seksi Kesiapsiagaan.
- 4) Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :

- a. Seksi Kedaruratan, dan
- b. Seksi Logistik.
- 5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, meliputi :
 - a. Seksi Rehabilitasi, dan
 - b. Seksi Rekonstruksi
- 6) Jabatan Fungsional
- 7) UPT Badan.

Rincian tugas, fungsi dan uraian tugas jabatan struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut :

1) Kepala Pelaksana Badan

Kepala Pelaksana Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Kepala Pelaksana Badan dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan bidang penanggulangan bencana daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi badan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Badan meliputi :

- a. Menyusun rencana kerja Badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah Badan;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Merumuskan kebijakan urusan pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Menyelenggarakan kebijakan urusan pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Menyelenggarakan pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
- j. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan;
- k. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
- l. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- m. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Pelaksana Badan dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. Menyelenggarakan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan badan. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran Badan Penanggulangan Bencana;
 - b. Pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - c. Pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan asset, dan dokumentasi;
 - d. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup badan;
 - e. Pelaksanaan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan badan penanggulangan bencana daerah;
 - f. Pelaksanaan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
 - g. Pelaksanaan perencanaan dan evaluasi kinerja badan;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Subbagian Umum, Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.
- Subbagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan yang

mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan kinerja, dan peraturan perundang-undangan.

- Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan.

Uraian tugas Sekretaris meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah badan;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran badan penanggulangan bencana daerah;
- g. Melaksanakan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- h. Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan asset, dan dokumentasi;
- i. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup badan;

- j. Melaksanakan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana daerah;
- k. melaksanakan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
- l. melaksanakan penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi kinerja Badan;
- m. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang dalam lingkup Badan;
- n. melaksanakan perencanaan dan evaluasi kinerja Badan;
- o. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
- p. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- q. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi ;

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - d. Pelaksanaan administrasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Seksi Pencegahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pencegahan.
- Seksi Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesiapsiagaan.

Uraian tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah badan;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. merumuskan rencana dan pelaksanaan pengkajian,

- pengembangan, pemantauan dan pemantapan penanggulangan bencana;
- g. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana;
 - h. melaksanakan evaluasi kegiatan penanggulangan bencana;
 - i. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - j. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - k. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4) Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik Dipimpin oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik yang mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kedaruratan dan logistik. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kedaruratan dan logistik;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang kedaruratan dan logistik;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kedaruratan dan logistik;
 - d. Pelaksanaan administrasi di bidang kedaruratan dan logistik; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Seksi Kedaruratan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kedaruratan.
 - Seksi Logistik dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas membantu kepala bidang kedaruratan dan logistik dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang logistik.

Uraian tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah badan;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. merumuskan rencana dan pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana daerah;
- g. melaksanakan tanggap kedaruratan dan logistik;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik;
- i. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;

- j. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepala bidang kedaruratan dan logistik dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - d. Pelaksanaan administrasi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; dan;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Seksi rehabilitasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis rehabilitasi.
 - Seksi Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rekonstruksi.

Uraian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. merumuskan rencana dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- g. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana;
- h. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- i. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- j. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- k. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

SUMBER DAYA

Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kepulauan Selayar dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan mengedepankan profesionalisme yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan sebagai pondasi utama dalam upaya untuk mencapai tujuan dimana potensi yang dimilikinya diarahkan untuk merealisasikan Visi dan Misi.

3. LINGKUNGAN STRATEGI

1. Sumber Daya Aparatur

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan mengedepankan profesionalisme yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan sebagai pondasi utama dalam upaya untuk mencapai tujuan dimana potensi yang dimilikinya diarahkan untuk merealisasikan Visi dan Misi antara lain :

1. Jumlah ketersediaan SDM (ASN dan PHL) BPBD Kab.Kep. Selayar

Tabel 1.1
Potensi Sumber Daya Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Pangkat / Gol.	Jumlah	Pendidikan	Keterangan
1.	Pembina Utama Muda	1 Orang	S2	Kepala Pelaksana
2.	Pembina	2 Orang	S1/S2	Sekretaris, Kepala Bidang
3.	Penata TK. I	7 Orang	S 1/DIII	Kepala Bidang Kepala Seksi dan Kasubag.
4.	Penata	3 Orang	S 1	Kepala Seksi
5.	Penata Muda	3 Orang	S1	Staf

6.	Pengatur	3 Orang	SMA	Staf
7.	Pengatur Muda	1 Orang	SMA	Staf
8.	-	95 Orang	S1, DII dan SMA	Pegawai Harian Lepas
Jumlah		115 orang		

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2022.

Tabel di atas, menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya aparatur belum cukup memadai dengan total pegawai sebanyak 115 orang, melihat kenyataan yang ada di lapangan masih membutuhkan aparatur yang memiliki kemampuan / skill yang secara teknis mampu menyikapi persoalan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dinilai semakin kompleks.

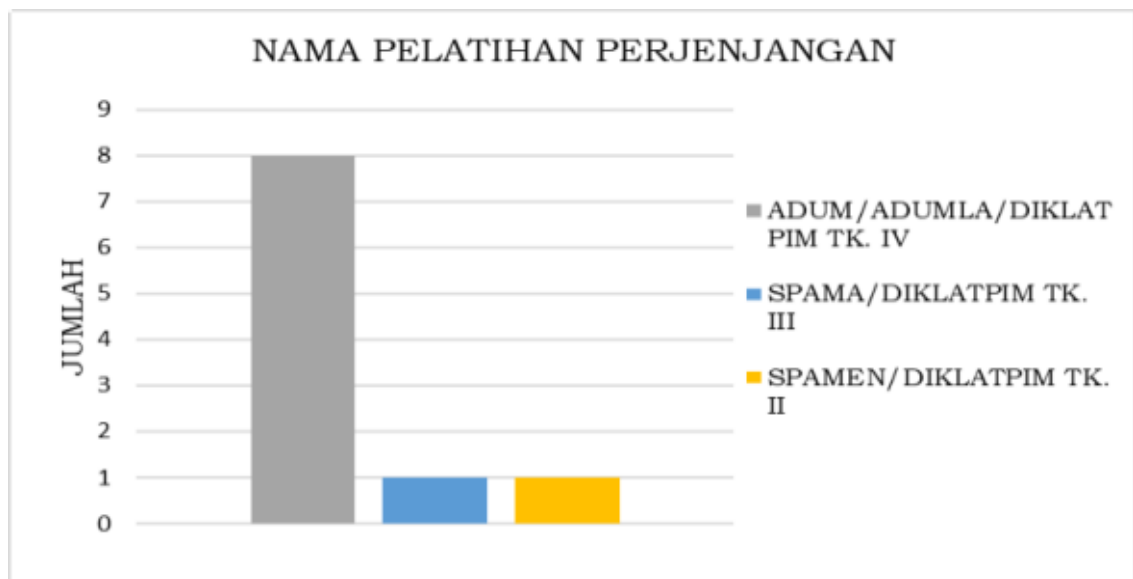
2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

No.	Nama Pelatihan Penjenjangan	Jumlah
1	ADUM/ADUMLA/DIKLATPIM TK. IV	8 Orang
2	SPAMA/ DIKLATPIM TK. III	1 Orang
3	SPAMEN/DIKLATPIM TK. II	1 Orang
JUMLAH		10 Orang

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2022.



Tabel di atas, menunjukkan bahwa sumber daya aparatur yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan masih 10 orang atau sekitar 63 % dari total pejabat lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1	IV	3 Orang
2	III	13 Orang
3	II	4 Orang
4	I	0 Orang
5	PHL	95 Orang
Jumlah		115 Orang

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2022.



Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 16 jabatan struktural dengan golongan ruang IV dan III, dan golongan ruang II terdapat 4 orang ASN, dan Pekerja Harian Lepas sebanyak 95 orang dengan total ASN dan PHL sebanyak 115 orang pada lingkup BPBD Kab.Kep. Selayar.

4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon Dan staf

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1 Orang
2	Eselon III	4 Orang
3	Eselon IV	3 Orang
4	Fungsional	12 Orang
5	Staf	-
Jumlah		20 Orang

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2022.



Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 1 orang yang menduduki jabatan eselon II sebagai Kepala Pelaksana BPBD, dan terdapat 4 orang yang menduduki jabatan eselon III sebagai Sekretaris dan Kepala Bidang, dan terdapat 3 orang yang menduduki jabatan eselon IV sebagai Kepala Seksi/Kasubag, dan 12 orang dengan jabatan Fungsional dengan total ASN sebanyak 20 orang pada lingkup BPBD Selayar.

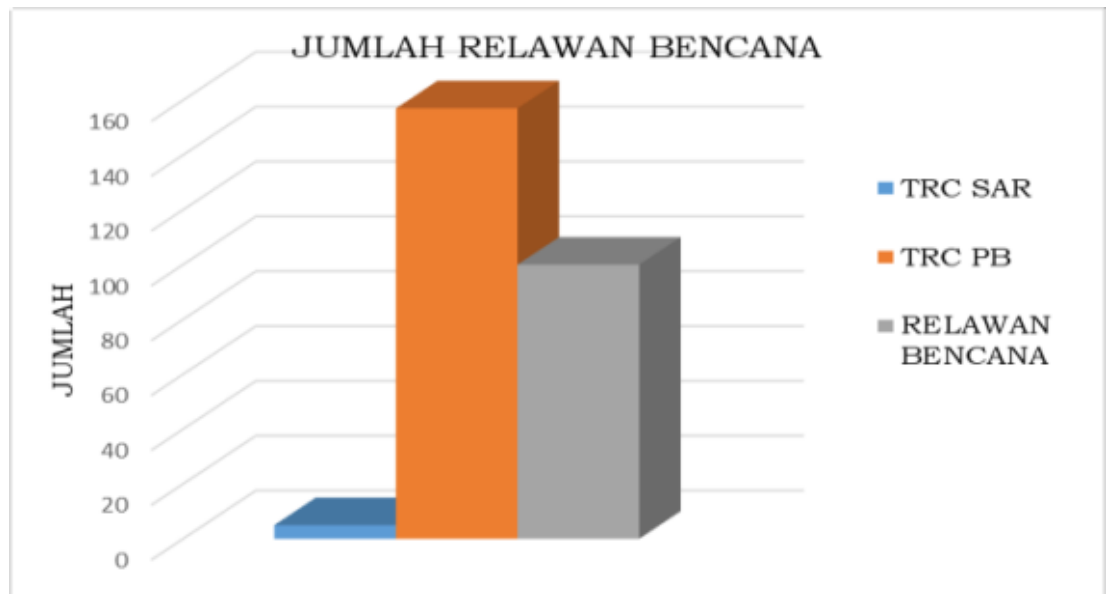
5. Relawan Bencana

Tabel.1.5

Jumlah Relawan Bencana

No.	Uraian	Jumlah
1	Tim SAR	5 Orang
2	TRC PB	157 Orang
3	Relawan Bencana (RB)	100 Orang
Jumlah		217 Orang

Sumber: BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2022.



Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 5 orang sebagai Relawan Tim SAR, dan terdapat 157 orang sebagai relawan TRC PB, dan terdapat 100 orang sebagai relawan bencana desa yang ada di 4 desa dan 1 kelurahan.

6. Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, disamping ketersediaan sumberdaya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini rincian ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tabel. 1.6

Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana
Penanggulangan bencana (kendaraan operasional)

No.	Uraian	Jumlah	Tahun Perolehan	Kondisi		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Mobil Dapur Lapangan Izusu NKR BNPB	1 Unit	2011	√		
2	Mobil Rescue Ford RDC	1 Unit	2011	√		
	STD Colt L 300	1 Unit	2018	√		
3	Speed Boat	1 Unit	2009			√
4	Kapal Laut Bermotor	1 Unit	2010			√
	Dolphin	1 unit	2015			√
	Politilene	2 unit	2016			√
5	Motor Lapangan	2 Unit	2011	√		
	Trail Kawasaki LX	2 unit	2016			
6	Motor Dinas lainnya	20 Unit	2010	√		
			2011			
			2012			
			2013			
			2014			
			2016			

			2017			
	JUMLAH	32 Unit		28	0	4

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2022.

Berdasarkan tabel di atas, menjelaskan jumlah aset yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kepulauan Selayar berupa kendaraan operasional, dapat dilihat terdapat 32 unit kendaraan operasional, dari total tersebut 31 unit aset dengan kondisi baik dengan persentase 87,5 %, dan terdapat aset dengan kondisi rusak berat sebanyak 4 unit dengan persentase 12,5 %, dan tidak terdapat aset dengan kondisi rusak ringan dengan persentase 0 %. Komposisi data tersebut dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebutuhan aset di lingkungan BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar di tahun berikutnya.

7. Peralatan Kebencanaan

Tabel. 1.7

Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana
Penanggulangan bencana (peralatan kebencanaan)

No	Uraian	Jumlah		Tahun Perolehan	Kondisi		
					Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Tenda Pengungsi	4	Peti	2011	√		
2	Tenda Dome/Tenda Keluarga	5	Buah	2011	√		
3	Multi Purpose Solar Cell	13	Buah	2015	√		

4	Baju Pelampung	233	Buah	2008	√	√	
		410	Buah	2009 2015			
5	Pesawat telepon Rig2 M Band	1	Buah	2008			√
6	Tandu	2	Buah	2007	√		
7	Vellbad	160	Buah	2009 2016	√	√	√
8	Kantong Mayat	10	Lembar	2007/2008	√		
9	Selimut	20	Lembar	2008	√		
10	Field Bad BNPB	10	Buah	2011	√		
11	Tangga Aluminium/Katro I	2	Buah	2011			√
12	Tenda peleton	2	Buah	2011	√		
13	Tabung Pemadam Indoka	10	Buah	2011	√		
14	Tenda Posko	1	Buah	2011	√		
15	Tenda Regu	3	Buah	2011	√		
16	Tenda Keluarga BNPB	4	Buah	2011	√		
17	BNPB water treatment	1	Unit	2011	√		
18	Baju Anti Api/Foil	1	Buah	2011	√		
19	Chain Saw	1	Buah	2014/2017	√		

20	Garmin GPS	1	Buah	2014	√		
21	Sargon Alas Tenda	6	Lembar	2015	√		
22	Hoda Generation Set	1	Buah	2014	√		
23	Senter HiD Seachlight	1	Buah	2011	√		
24	RIG Pesawat Radio	1	Buah	2011			√
25	Handy Talky Icom	4	Buah	2009			√
26	HT ALINCO	15	Buah	2008			√
27	Faximili Panasonic	1	Buah	2011	√		
28	Light Lamp Senter Kepala	20	Buah	2011			√
29	Toa Mega Phone	1	Buah	2011	√		
30	Helm Standar	75	Buah	2011		√	√
31	Sony Handycam	1	Buah	2011	√		
32	Camera Digital	1	Buah	2010/2014 2017	√		
33	Mesin Kapal Djiangdong JD 300	2	Buah	2014	√		
34	Peralatan Deteksi Gempa	1	Unit	2015	√		

Sumber : Data Inventaris Peralatan pada Bidang kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Kep. Selayar Tahun 2022.

Sarana dan prasarana ini digunakan dalam kondisi tertentu, yang dapat dimobilisasikan pada saat terjadi bencana (tanggap darurat) dalam berbagai skala baik lokal, regional maupun nasional. Dengan demikian BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar menggunakan sarana dan prasarana ini secara selektif dengan mempertimbangkan tingkat kejadian dan kemampuan daerah dalam menangani bencana.

3. Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka dalam tahun 2022 tersedia anggaran sebesar Rp.16.646.569.300,- (Enam Belas Milyar Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah) dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.8

Program kegiatan keuangan tahun 2022

No.	JENIS BELANJA	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Belanja Langsung			13.126.881.800,-
	- Belanja Pegawai			1.693.998.000,-
	- Belanja Barang & Jasa			11.432.883.800,-
	- Belanja Modal			3.519.687.500
		A. Program Penunjang Urusan	1. Perencanaan, Penganggaran, dan	20.160.000,-

		Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.599.000,-
			- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	2.071.000,-
			- Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA – SKPD	2.071.000,-
			- Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA – SKPD	2.071.000,-
			- Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA – SKPD	2.071.000,-
			- Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA – SKPD	3.900.000,-
			- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4.377.000,-
			- Evaluasi kinerja perangkat daerah	

			2. Administrasi keuangan perangkat daerah	1.703.898.000,-
			- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1.693.998.000,-
			- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	7.200.000,-
			- Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	2.700.000,-
			3. Administrasi Barang milik Daerah pada perangkat daerah	3.000.000,-
			- Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD	3.000.000,-
			4. Administrasi kepegawaian perangkat daerah	18.000.000,-
			- Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	18.000.000,-

			5. Administrasi umum perangkat daerah	220.314.000,-
			- Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	5.478.000,-
			- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.800.000,-
			- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	6.350.000,-
			- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	201.686.000,-
			6. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	85.930.500,-
			- Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	52.640.5000,-
			- Pengadaan Aset tetap lainnya	33.290.000,-
			7. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	195.796.800,-
			- Penyediaan jasa surat menyurat	2.800.000,-

			- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa pelayanan umum dan kantor	87.631.400,- 105.365.400,-
			8. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya - Pemeliharaan /rehabilitasi gedung	233.677.000,- 40.000.000,- 131.370.000,- 30.507.000,- 31.800.000,-

			kantor dan bangunan lainnya	
		B. Program penanggulangan bencana	1. Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	42.294.000,-
			- Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten / kota	42.294.000,-
			2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	13.824.690.500,-
			- Pengelolaan Risiko Bencana	112.901.000,-
			- Penguatan Kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	50.182.000,-
			- Penanganan pascabencana kabupaten/kota	13.605.075.000,-
			- Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana kabupaten /kota	56.532.500,-
			3. Pelayanan penyelamatan dan	221.461.550,-

			evakuasi korban bencana	
			- Respon cepat darurat bencana kabupaten/kota	164.769.500,-
			- Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota	50.090.500,-
			- Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota	79.961.500,-
			- Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	6.987.000,-

D. Isu – isu Strategis

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan BPBD sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Sub Bagian, Bidang dan Seksi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu:

1. Terbatasnya sumber daya aparatur bidang penanggulangan bencana, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas.
2. Masih terbatasnya jumlah dan kualitas aparat dalam mendukung pelaksanaan tugas
3. Masih lemahnya sistim pendataan/informasi
4. Alokasi anggaran yang belum memadai dalam rangka Penanggulangan Bencana
5. Belum Optimalnya koordinasi pelaksanaan Penanggulangan Bencana
6. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- 1) Faktor Internal :
 1. Keterbatasan sumber daya aparatur penanggulangan bencana
 2. Jumlah aparatur belum mencukupi
 3. Sarana dan prasarana belum memadai
- 2) Faktor Eksternal :
 1. Kurangnya alokasi anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana
 2. Belum maksimalnya koordinasi lintas sektoral
 3. Belum maksimalnya kepedulian masyarakat dalam penanggulangan bencana.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan dan sebagian besar kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Seiring dengan estafet kepemimpinan Bupati di Kabupaten Kepulauan Selayar dan telah terpilih dan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 17 Februari 2016, maka Bupati dan Wakil Bupati berkewajiban untuk menyampaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai acuan dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah serta dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi , misi , dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional . (*Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang " Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 "*).

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan global. Untuk maksud perencanaan tersebut sudah tentu diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran setelah memandang melalui pendekatan menyeluruh.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang Penanggulangan Bencana, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Rencana strategis yang disusun merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal dan merupakan langkah yang penting

dengan memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026, maka secara sinergi pula Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) 2021 - 2026. Sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 7 ayat (1) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Selanjutnya, Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Sesuai dengan kondisi masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar, permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada masa yang akan datang serta dengan memperhitungkan faktor-faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat serta stakeholder lainnya, maka dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026 dicanangkan Visi Kabupaten Kepulauan Selayar

“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”

Berdasarkan rumusan strategi dan arah kebijakan, maka ditarik beberapa prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026, yang kemudian diturunkan ke Program Pembangunan Daerah. Program prioritas dimaksud terdiri dari tiga pilar pembangunan dan satu program unggulan sebagai penopang dari Visi Bandar Maritim. Program Prioritas tersebut terdiri atas :

1. Pembangunan Distribusi Logistik (PDL);
2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata;
3. Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT);
dan
4. Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari).

Untuk mengantar pada penajaman Program Pembangunan Daerah yang akan digunakan dalam mewujudkan Visi Bandar Maritim tersebut, berikut dijelaskan pendekatan pembangunan wilayah yang akan diwujudkan pada tiap kawasan pengembangan, yaitu :

1. Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata dan sekitarnya, didukung oleh 5 (lima) sub kawasan, yaitu :
 - a. Sub Kawasan Utama pada Kawasan Pelabuhan Benteng.
 - b. Sub Kawasan 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi.
 - c. Sub Kawasan 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng – Jampea.
 - d. Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate.
 - e. Sub Kawasan 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata Kecamatan Bontomatene, berupa :

- a. Tersedianya lahan untuk kawasan.
- b. Tersedianya kajian dan kelengkapan administrasi pembentukan kawasan.
- c. Terbangunnya fasilitas pergudangan dan penumpang.
- d. Tersedianya kapal pengangkut barang dan penumpang.

Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan 2.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Pasi – Gusung, didukung oleh 7 (tujuh) sub kawasan, yaitu :

- a. Sub Kawasan 1 pada Kawasan Matalalang.
- b. Sub Kawasan 2 pada Kawasan Baloiya.
- c. Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pantai Pinang.
- d. Sub Kawasan 4 pada Kawasan Pantai Bahuluang.
- e. Sub Kawasan 5 pada Kawasan Pantai Polassi.
- f. Sub Kawasan 6 pada Kawasan Pantai Kayuadi.
- g. Sub Kawasan 7 pada Kawasan Pulau Panjang.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Pasi–Gusung Kecamatan Bontoharu, berupa :

- a. Terbentuknya kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata.
 - b. Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan.
 - c. Dimulainya pembangunan fasilitas hunian.
 - d. Dimulainya pembangunan pelabuhan pariwisata.
3. Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang, didukung oleh 5 (lima) sub sentra, yaitu :
- a. Sub Sentra Utama pada Kawasan TPI Bonehalang.
 - b. Sub Sentra 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi.
 - c. Sub Sentra 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng – Jampea.
 - d. Sub Sentra 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate.
 - e. Sub Sentra 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang Kecamatan Bontosikuyu, berupa

- a. Tersedianya lahan untuk kawasan.
 - b. Tersedianya kajian dan kelengkapan administrasi pembentukan kawasan.
 - c. Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan.
 - d. Dimulainya pembangunan pelabuhan perikanan.
 - e. Dimulainya pembangunan fasilitas industri.
4. Gerakan Membangun Desa Mandiri atau lebih dikenal dengan istilah GERBANGSARI merupakan Program Unggulan sebagai penguat atau sebagai penopang dari tiga pilar pembangunan PDL, KEK, dan KIPT. Gerbagsari mempunyai dua dimensi pelaksanaan yaitu meningkatkan status desa dan meningkatkan ekonomi perdesaan dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan utama meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai dari dua dimensi pelaksanaan tersebut adalah pembangunan dan peningkatan prasarana perdesaan, penataan kawasan permukiman, dan

pembangunan ekonomi perdesaan. Program Gerbagsari dilaksanakan melalui penyediaan payung hukum petunjuk pelaksanaan, dianggarkan melalui APBD atau sumber pendanaan lain yang sah. Sementara itu kegiatan OPD yang lingkup kegiatannya sama atau sejalan dapat diintegrasikan ke dalam program Gerbangsari. Sebagai indikator capaian dari program Gerbangsari ini diantaranya meningkatnya penyediaan lapangan kerja, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Alam, meningkatnya pendapatan masyarakat, dan meningkatnya kesehatan lingkungan permukiman.

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan;
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
4. Mengembangkan pengelolaan potensi kelautan;
5. Meningkatkan pembinaan kehidupan sosial dan keagamaan;
6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup.

3. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke

dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian visi dan masing-masing misi.

sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan telaah arah pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, maka ditetapkan Tujuan Pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kemudian berdasarkan tujuan pembangunan BPBD tersebut, maka disusun sasaran strategis BPBD, adapun yang menjadi tujuan dan sasaran BPBD selama lima tahun 2021-2026 adalah :

MISI 1

Tujuan 1 :

- Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan SPM.

Sasaran :

- ❖ Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan 2 :

- Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Sasaran :

- ❖ Meningkatnya nilai SAKIP.

Tujuan 3 :

- Meningkatkan tertib pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah.

Sasaran :

- ❖ Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

MISI 3

Tujuan :

- Mewujudkan perlindungan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.

Sasaran :

- ❖ Meningkatnya kualitas pelayanan kebencanaan.

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran						Kondisi kinerja pada akhir Periode RPJMD
				Pada tahun ke-						
(1)	(2)	(3)	(4)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	(11)
1.	MISI 1									
	1. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan SPM	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat	0,6700	0,6800	0,6900	0,7000	0,7100	0,7200	0,7200
	2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatnya nilai SAKIP	Nilai SAKIP daerah	55,85 (CC)	60,00 (B)	65,00 (B)	70,00 (BB)	75,00 (BB)	80,00 (A)	80,00 (A)
	3. Meningkatkan tertib pengelolaan administrasi keuangan	Meningkatnya tertib pengelolaan administrasi keuangan	Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai

	trasi keuangan dan aset daerah	dan aset daerah								
2.	MISI 3									
	1. Mewujudkan perlindungan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana		Persentase layanan kebencanaan pada masyarakat (pra bencana tanggap darurat, pasca bencana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya kualitas pelayanan kebencanaan	Persentase layanan pengurangan risiko bencana pada masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase korban bencana yang tertangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase penanganan pasca bencana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN /FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kebencanaan	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	(Jumlah Penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana / seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana) X 100%	Laporan kegiatan
2.		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah SDM/Masyarakat di daerah rawan bencana yang mengikuti pelatihan penanggulangan bencana	Laporan kegiatan
3.		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	(Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan di evakuasi / Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana) X 100%	Laporan kegiatan

C. Rencana Kerja Tahunan

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka ditetapkan Rencana Kerja Tahun 2022 sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - b. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA – SKPD
 - c. Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA – SKPD
 - d. Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA – SKPD
 - e. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA – SKPD
 - f. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - g. Evaluasi kinerja perangkat daerah
2. Administrasi keuangan perangkat daerah
 - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun
 - c. Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan
3. Administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
 - a. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
5. Administrasi umum perangkat daerah
 - a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor
 - b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- c. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
 - d. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- 6. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - a. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - b. Pengadaan aset Tetap lainnya
- 7. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa pelayanan umum dan kantor
- 8. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - c. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - d. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
- B. Program penanggulangan bencana
 - 1. Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten / kota
 - a. Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten / kota
 - 2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
 - a. Pengelolaan risiko bencana kabupaten / kota
 - b. Penguatan kapasitas kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - c. Penanganan pascabencana kabupaten / kota

- d. Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana kabupaten / kota
- 3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
 - b. Respon cepat darurat bencana kabupaten / kota
 - c. Pencarian pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten / kota
 - d. Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten / kota
 - e. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

Program dan Kegiatan Tahun 2022

Dalam upaya pencapaian target pada Rencana Strategis Tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melaksanakan 2 Program dengan 11 kegiatan dan 34 sub kegiatan.

Penetapan Kinerja bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Perjanjian/ Penetapan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sebagaimana tabel berikut :

TABEL PERJANJIAN/PENETAPAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan aparatur dibidang penanggulangan bencana	Persentase capaian kinerja		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Rp 2,480,776,300.00	
		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun		A. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 20,160,000.00	
		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersedia	2 dokumen	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 3,599,000.00	
		Jumlah Dokumen RKA SKPD yang tersedia	1 dokumen	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Rp 2,071,000.00	
		Jumlah Dokumen perubahan RKA SKPD yang tersedia	1 dokumen	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Rp 2,071,000.00	
		Jumlah Dokumen DPA SKPD yang tersedia	1 dokumen	4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Rp 2,071,000.00	
		Jumlah Dokumen perubahan DPA SKPD yang tersedia	1 dokumen	5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Rp 2,071,000.00	
		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 dokumen	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 3,900,000.00	
		Jumlah Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	4 dokumen	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 4,377,000.00	
		Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah		B. Administrasi Keuangan	Rp 1,703,898,000.00	

	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	1 Laporan	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 1,693,998,000.00	
	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 dokumen	2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 7,200,000.00	
	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	1 dokumen	3 Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp 2,700,000.00	
	Administrasi Barang milik daerah pada perangkat Daerah		C. Pengadaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Rp 3,000,000.00	
	Pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah pada skpd	4 Laporan	1. Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Rp 3,000,000.00	
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah		D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 18,000,000.00	
	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang dilaksanakan	4 orang	1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 18,000,000.00	
	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah		E. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 220,314,000.00	
	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	8 Komponen	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp 5,478,000.00	
	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	22 Buah	2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 6,800,000.00	
	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	7 Layanan	2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Rp 6,350,000.00	
	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah SKPD yang diselenggarakan	350 Kali	3 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 201,686,000.00	
	Persentase pemenuhan barang milik daerah		F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 85,930,500.00	

		Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan	4 Unit	1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 52,640,500.00	
		Jumlah aset tetap yang tersedia	25 Buah	2 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Rp 33,290,000.00	
		Penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah		G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 195,796,800.00	
		Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia	1 Tahun	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Rp 2,800,000.00	
		Jumlah jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Tahun	2 penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 87,631,400.00	
		Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Tahun	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 105,365,400.00	
		Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah		H. Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 233,677,000.00	
		Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 unit	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 40,000,000.00	
		Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	23 Unit	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 131,370,000.00	
		Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	14 unit	3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Rp 30,507,000.00	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	1 unit	4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 31,800,000.00	
2	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Persentase desa / kelurahan yang memperoleh layanan penanggulangan bencana		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rp 14,165,793,000.00	
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		A. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	Rp 42,294,000.00	
		Jumlah warga negara yang mendapat sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi pada daerah rawan bencana	2 Kecamatan	1 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten /Kota (Per Jenis Bencana)	Rp 42,294,000.00	

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

		Persentase warga negara yang memperoleh layanan dan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana		B. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp 13,824,690,500.00	
		Jumlah Pemangkasan / penebangan / pembersihan pohon yang berpotensi menimbulkan dampak	50 orang	1 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten / Kota	Rp 112,901,000.00	
		Jumlah Pemangkasan / penebangan / pembersihan pohon yang berpotensi menimbulkan dampak bencana, pohon tumbang dalam dan luar wilayah kota	1 Desa	2 Penguatan Kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Rp 50,182,000.00	
		Jumlah Penanganan Pascabencana yang terpenuhi	1 tahun	3 Penanganan Pascabencana Kabupaten / Kota	Rp 13,605,075,000.00	
		Jumlah Tim Reaksi Cepat (TRC) yang ditingkatkan kapasitasnya	20 orang	4 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten / Kota	Rp 56,532,500.00	
		Persentase warga negara yang mendapatkan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		C. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp 298,808,500.00	
		Jumlah penanganan darurat bencana yang dilaksanakan	40 KK	1 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana Kabupaten / Kota	Rp 164,769,500.00	
		Jumlah penanganan korban bencana yang dievakuasi	527 Orang	2 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Rp 50,090,500.00	
		Jumlah logistik penyelamatan dan evakuasi yang disediakan	2 paket logistik	3 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Rp 76,961,500.00	
		Pelaksanaan Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	15 Orang	4 Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Rp 6,987,000.00	
Jumlah					Rp 16,646,569,300.00	

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. AHMAD ANSAR, M.Si

Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. MUH. BASLI ALI

Jabatan : Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 04 Januari 2022

Pihak Kedua,

H. MUH. BASLI ALI

Pihak Kesatu,



Drs. AHMAD ANSAR, M.Si

**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KEPALA PELAKSANA BADAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Kategori Kegiatan	Indikator Kinerja	Bentuk Dokumen	Jumlah Dokumen	Catatan
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah			
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang terpenaah			Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
	- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	- Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)			- Tersedianya dokumen RENJA
		- Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022		2 Dokumen	- Tersedianya dokumen perjanjian kinerja tahun anggaran 2022
	- Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	- Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)		1 Dokumen	- Tersedianya dokumen RKA
	- Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	- Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP)		1 Dokumen	- Tersedianya dokumen RKAP
	- Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	- Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)		1 Dokumen	- Tersedianya dokumen DPA
	- Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA SKPD	- Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPAP)		1.Dokumen	- Tersedianya dokumen DPAP
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) SKPD		1 Dokumen	- Tersedianya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan sebanyak 12 (Duabelas) Laporan

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Penyusunan LAKIP - Penyusunan LKPJ - Penyusunan LPPD - Penyusunan Buku Profil BPBD - Penyusunan SPM	- Tersedianya dokumen LAKIP - Tersedianya dokumen LKPJ - Tersedianya dokumen LPPD - Tersedianya dokumen Buku Profil BPBD - Tersedianya dokumen SPM	- Tersedianya dokumen LAKIP - Tersedianya dokumen LKPJ - Tersedianya dokumen LPPD - Tersedianya dokumen Buku Profil BPBD - Tersedianya dokumen SPM	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun - Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	- Jumlah Laporan Keuangan yang dapat dipenuhi - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun - Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan BPK dan Inspektorat	- Penyediaan dokumen 1 (satu) Dokumen 1 (satu) Laporan 1 (satu) Laporan	- Perencanaan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan - Tersedianya gaji dan tunjangan bagi ASN selama 1 (satu) tahun - Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun sebanyak 1 (satu) Laporan - Tersedianya dokumen dan bahan tanggapan pemeriksaan	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah yang diseleksi - Penyediaan laporan aset SKPD	2 Laporan	- Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah - Tersedianya laporan aset SKPD	
4	Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Jumlah Peningkatan Kompetensi Teknis Pegawai - Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi melalui Bimtek	4 orang Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis	- Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Teknis Pegawai - Terlaksananya Peningkatan Kompetensi teknis Pegawai yang mengikuti Bimtek 4 orang	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah Pelayanan Jasa Administrasi yang dapat dipenuhi - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8 komponen alat listrik yang terpasang 22 Buah barang cetakan dan penggandaan	- Terlaksananya Pelayanan Jasa Administrasi yang dapat dipenuhi - Tersedianya komponen alat listrik yang terpasang sebanyak 8 buah - Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	

	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Penyediaan kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7 tabloid Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7 tabloid	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Pelaksanaan Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam & Luar Daerah	1 laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam & Luar Daerah	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang tersedia - Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit Peralatan dan mesin lainnya yang dapat disediakan	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah - Tersedianya Peralatan dan mesin lainnya 4 Unit	
	- Pengadaan Aset Tetap Lainnya	- Penyediaan aset tetap lainnya	26 Buah aset tetap lainnya yang disediakan	- Tersedianya Aset Tetap Lainnya	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan jasa surat menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia - Penyediaan jasa surat menyurat - Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Dokumen 3 unit layanan jasa komunikasi, air & listrik	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Tersedianya dokumen surat menyurat - Tersedianya jasa komunikasi, air & listrik 3 unit layanan	
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1) Laporan	- Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor 1 Laporan	

8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tersedia	1 (satu) Unit Mobil Jabatan yang dipelihara	Terperuhnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan		Terlaksananya pemeliharaan Mobil Jabatan 1 Unit
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	1 (satu) Laporan	Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional 23 Unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 (satu) Laporan	Terlaksananya pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya 22 Unit
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pelaksanaan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 (satu) Laporan	Terlaksananya pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor 1 Unit
B.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KORBAN DARURAT BENCANA		
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Jasa Informasi Rawan Bencana		Persentase Penanganan Korban Darurat Bencana
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Pendataan dan pengambilan titik koordinat pada daerah rawan bencana	Jumlah daerah rawan bencana yang telah didata	Tersedianya data potensi daerah rawan bencana
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Penanganan Wilayah Manajemen Bencana		Cakupan Penanganan Wilayah Manajemen Bencana
	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Penebangan / pemangkasan pohon	Jumlah pohon yang ditebang/di pangkas yang berpotensi menimbulkan dampak bencana pohon tumbang	Tertanganunya pohon yang berpotensi menumbulkan bencana / pohon tumbang

	- Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	- Pemasangan rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul, dan rambu informasi bencana pada daerah rawan bencana	- Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitas pencegahan dan kesiapsiagaan	- Tersedianya rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul, dan rambu informasi bencana pada daerah rawan bencana	
	- Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	- Jumlah Personil Tim Reaksi Cepat yang terlatih	- 1 (satu) Laporan Personil Tim Reaksi Cepat yang terlatih	- Tersedianya SDM Tim Reaksi Cepat yang terlatih sebanyak 20 Orang	
	- Penanganan pascabencana kabupaten/kota	- Peninjauan dan assesment	- Jumlah rumah yang ditinjau dan diassesment	- Data nilai kerusakan dan kebutuhan atap seng	
		- Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat pascabencana	- Jumlah rumah yang mendapat bantuan perbaikan atap seng	- Data rumah yang mendapat bantuan perbaikan atap seng	
		- Monitoring dan evaluasi	- Jumlah rumah yang telah memanfaatkan dan belum memanfaatkan bantuan perbaikan rumah	- Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi	
		- Koordinasi dan konsultasi penanganan pascabencana	- Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi penanganan pascabencana	- Tersedianya laporan hasil koordinasi dan konsultasi	
		- Pendampingan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi	- Jumlah dokumen pendampingan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi	- Terlaksananya pendampingan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi	
		- Rekonstruksi Tanggul Pengaman Pantai Desa Buki Kec. Buki dan Rekonstruksi Tanggul Pengaman Sungai Barugaya Kec. Bontomanai	- Panjang Tanggul Pengaman Pantai Desa Buki Kec. Buki dan Tanggul Pengaman Sungai Barugaya Kec. Bontomanai yang terbangun	- Terlindungnya rumah penduduk dan aset dari kerusakan akibat gelombang pasang dan banjir	
	- Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	- Jumlah Personil Tim Reaksi Cepat yang terlatih	- 1 (satu) Laporan Personil Tim Reaksi Cepat yang terlatih	- Tersedianya SDM Tim Reaksi Cepat yang terlatih sebanyak 20 Orang	

Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	- Jumlah Logistik dan peralatan yang diperoleh dari pemerintah Provinsi dan BNPB serta Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi oleh Daerah	1 (satu) Laporan Keterediaan Logistik dan Peralatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab./Kota	Terlaksananya Penerimaan Logistik dan Peralatan serta Penyediaan Logistik di Daerah	
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	- Aktivasi Sistem Komando	1 (satu) Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando	Terlaksananya Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando	

Benteng, 4 Januari 2022

KEPALA PELAKSANA BPBD,

Drs. ARMAH ARSAR, M. Si

NIP. 19730406 199203 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029

BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROSA INDAH HASAN, SP.
Jabatan : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. AHMAD ANSAR, M.Si
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 04 Januari 2022

Pihak Pertama,

ROSA INDAH HASAN, SP.

Pihak Kedua,

Drs. AHMAD ANSAR, M.Si

**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
SEKRETARIS BADAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kategori		Indikator		Target	
A. PROGRAM PERUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah			
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang terpenuhi		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)		Tersedianya dokumen RENJA	
		Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022		Tersedianya dokumen perjanjian kinerja tahun anggaran 2022	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)		Tersedianya dokumen RKA	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP)		Tersedianya dokumen RKAP	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)		Tersedianya dokumen DPA	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA SKPD	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPAP)		Tersedianya dokumen DPAP	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) SKPD		Tersedianya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan sebanyak 12 (Duabelas) Laporan	

	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Penyusunan LAKIP	5 Dokumen	- Tersedianya dokumen LAKIP
		- Penyusunan LKPJ		- Tersedianya dokumen LKPJ
		- Penyusunan LPPD		- Tersedianya dokumen LPPD
		- Penyusunan Buku Profil BPBD		- Tersedianya dokumen Buku Profil BPBD
		- Penyusunan SPM		- Tersedianya dokumen SPM
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang dapat dipenuhi		Presentase Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 (satu) Dokumen	- Tersedianya gaji dan tunjangan bagi ASN selama 1 (satu) tahun
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 (satu) Laporan	- Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun sebanyak 1 (satu) Laporan
	- Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	- Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan BPK dan Inspektorat	1 (satu) Laporan	- Tersedianya dokumen dan bahan tanggapan pemeriksaan
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah yang disediakan		Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah
	- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Penyediaan laporan aset SKPD	2 Laporan	- Tersedianya laporan aset SKPD
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Peningkatan Kompetensi Teknis Pegawai		Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Teknis Pegawai
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi melalui Bimtek	4 orang Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis	- Terlaksananya Peningkatan Kompetensi teknis Pegawai yang mengikuti Bimtek 4 orang
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Jasa Administrasi yang dapat dipenuhi		Terlaksananya Pelayanan Jasa Administrasi yang dapat dipenuhi
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	8 komponen alat listrik yang terpasang	- Tersedianya komponen alat listrik yang terpasang sebanyak 8 buah

	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Penyediaan kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7 tabloid	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Pelaksanaan Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam & Luar Daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam & Luar Daerah	
6	- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang tersedia	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Tersedianya Peralatan dan mesin lainnya 4 Unit	
	- Pengadaan Aset Tetap Lainnya	- Penyediaan aset tetap lainnya	- Tersedianya Aset Tetap Lainnya	
7	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	- Penyediaan jasa surat menyurat	- Penyediaan jasa surat menyurat	- Tersedianya dokumen surat menyurat	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Tersedianya jasa komunikasi, air & listrik 3 unit layanan	

	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1) Laporan	- Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor 1 Laporan
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tersedia		Terpekaanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	1 (satu) Unit Mobil Jabatan yang dipelihara	- Terlaksananya pemeliharaan Mobil Jabatan 1 Unit
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Iepangan	- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	1 (satu) Laporan	- Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional 23 Unit
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 (satu) Laporan	- Terlaksananya pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya 22 Unit
	- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Pelaksanaan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 (satu) Laporan	- Terlaksananya pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor 1 Unit

Benteng, 4 Januari 2022

SEKRETARIS BADAN,

R. / H.

ROSA HUDA HASAN, SP.
NIP. 19750218 200604 2 016



KEPALA PELAKSANA BPBD,

DR. AHMAD ANSAR, M. Si
NIP. 19730406 199203 1 002

[illegible]

[illegible]

4	Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA - SKPD	1. Pembentukan tim Penyusun Dokumen RKA Perubahan Rp 2.071.000 2. Melakukan koordinasi PPAS 3. Meminta dan mengumpulkan usulan RKA perubahan 4. Menyusun RKA perubahan 5. Melakukan asistensi RKA perubahan 6. Melakukan revisi hasil RKA perubahan 7. Melakukan review RKA perubahan 8. Melakukan revisi RKA perubahan hasil review 9. Menyampaikan RKA perubahan ke tim anggaran/tim asistensi 10. Dokumen RKA perubahan 1. Pembentukan tim Penyusun Dokumen DPA Rp 2.071.000	
5	Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan dokumen DPA - SKPD	2. Menghadiri rapat dengan tim anggaran DPRD 3. Melakukan koordinasi PPAS 4. Meminta dan mengumpulkan usulan DPA 5. Menyusun DPA 6. Melakukan asistensi DPA 7. Melakukan review DPA 8. Menyampaikan DPA ke tim anggaran/tim asistensi 9. Dokumen DPA 1. Pembentukan tim Penyusun Dokumen DPA Rp 2.071.000 2. Melakukan koordinasi PPAS 3. Meminta dan mengumpulkan usulan DPA 4. Menyusun DPA Perubahan 5. Melakukan asistensi DPA Perubahan 6. Melakukan revisi hasil DPA Perubahan 7. Melakukan review DPA Perubahan 8. Melakukan revisi DPA Perubahan hasil review	
6	Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan DPA - SKPD		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

14	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	4. Memindahbukukan gaji dan tunjangan ASN ke rekening masing-masing. 1. Pembentukan tim Penyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun 2. Menyiapkan dokumen realisasi belanja dan aset per triwulan 3. Melakukan revalidasi data akun-akun laporan keuangan per triwulan 4. Menyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun 5. Melakukan review Laporan Keuangan Akhir Tahun di Inspektorat 6. Menyampaikan laporan Keuangan Akhir Tahun ke BPKPD.	Rp 8.500.000		100%
15	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan BPK dan Inspektorat	1. Pembentukan Tim Tindak Lanjut OPD 2. Menyiapkan dokumen pemeriksaan 3. Menerima LHP BPK dan Inspektorat 4. Rapat koordinasi Tim Tindak Lanjut OPD 5. Menyusun bahan tanggapan pemeriksaan 6. Menyampaikan tanggapan pemeriksaan	Rp 2.700.000		100%
16	Penyediaan barang milik daerah yang dikelola	1. Mencatat barang milik daerah 2. Mengklarifikasi barang rusak 3. Membuat usulan penghapusan barang rusak berat 4. Membuat kartu inventaris barang 5. Membuat kartu inventaris ruangan 6. Membuat laporan	Rp 3.500.000		
17	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	1. Menentukan undangan pelatihan / binatek 2. Menerima disposisi dari Kepala Pelaksana 3. Membuat surat tugas 4. Membuat SPD 5. Membuat laporan	Rp 41.522.000		

18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Peningkatan Bangunan Kantor	1. Identifikasi Komponen Listrik 2. Membuat Daftar Kebutuhan dengan Nota Pesanan, BAST, BAP, dan Kwitansi 3. Tersedianya alat komponen listrik 4. Distribusi Sesuai Permintaan	Rp 6.478.000
19	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1. Membuat nota pesanan 2. Menerima barang sesuai nota pesanan 3. Membuat berita acara penerimaan barang 4. Memasang spanduk	Rp 8.000.000
20	Penyediaan kebutuhan Bahan Bacaan dan Peralatan Pendukung-undangan	1. Menerima Surat Permohonan Penawaran 2. Mengajukan Permohonan Media Kepada Pimpinan 3. Identifikasi permohonan media 4. Membuat data anggaran media 5. Menerima kwitansi pembayaran dari media 6. Mengajukan pembayaran kepada bendahara 7. Melaksanakan pembayaran kepada media 1. Menerima Surat Undangan/Panggilan 2. Mencatat Agenda Surat Masuk 3. Konfirmasi ke Tingkat Atas 4. Menerima Disposisi 5. Membuat ST/SPD 6. Mengkaji Acara Sesuai Surat Tugas 7. Membuat Laporan 8. Melengkapai SPJ	Rp 7.500.000
21	Penaksanaan Rapat Koordinasi & Konsultasi Dengan Lurah Daerah	1. Membuat nota pesanan 2. Membuat berita acara penerimaan barang 3. Membuat berita acara pemeriksaan barang 4. Membuat kwitansi pembayaran 1. Membuat nota pesanan 2. Membuat berita acara penerimaan barang 3. Membuat berita acara pemeriksaan barang 4. Membuat kwitansi pembayaran	Rp 250.000.000
22	Penyediaan peralatan dan mesin lainnya	1. Membuat nota pesanan 2. Membuat berita acara penerimaan barang 3. Membuat berita acara pemeriksaan barang 4. Membuat kwitansi pembayaran 1. Membuat nota pesanan 2. Membuat berita acara penerimaan barang 3. Membuat berita acara pemeriksaan barang 4. Membuat kwitansi pembayaran	Rp 65.850.000
23	Penyediaan Alat Tetap Lainnya	1. Membuat nota pesanan 2. Membuat berita acara penerimaan barang 3. Membuat berita acara pemeriksaan barang 4. Membuat kwitansi pembayaran	Rp 50.440.000
24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Menerima surat masuk 2. Mengagenda surat masuk 3. Memberikan lembar disposisi	Rp 2.800.000

		4 Mengantar surat ke ruangan sekretaris untuk diparaf	
		5 Mengantar surat ke ruangan Kelakas untuk disposisi	
		6 Mendiartibuatkan surat yang sudah di disposisi	
		7 Mengagenda surat keluar	
		8 Memberi nomor surat keluar	
		9 Mengantar surat	
25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Mengecek Daftar Tagihan bulanan	Rp 111.000.000
		2. Mengajukan Tagihan Kepada Bendahara	
26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Penyediaan ATK	Rp 148.805.800
		2. Melaksanakan Urusan Surat Menyurat	
		3. Pembuatan SK PPTK	
		4. Pembuatan SK Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai	
		5. Pengusulan Tenaga Kontrak	
		6. Pengusulan PA, PPK SKPD, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang	
		7. Pembayaran honorarium Pertanggungjawaban Keuangan PA, PPK SKPD, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang, Petugas Pengolahan Administrasi Belanja Pegawai, PPTK	
		8. Distribusi Surat Menyurat	
27	Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	1. Identifikasi Kebutuhan	Rp 40.000.000
		2. Pemeriksaan Berkala Kendaraan	
		3. Penggantian Suku Cadang	
		4. Servis	
		5. Pengisian BBM/Pelumas Oli	
28	Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	1. Identifikasi Kebutuhan	Rp 165.000.000
		2. Pemeriksaan Berkala Kendaraan	
		3. Penggantian Suku Cadang	
		4. Servis	
		5. Pengisian BBM/Pelumas Oli	
29	Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Identifikasi Kebutuhan	Rp 24.207.000
		2. Servis /Perbaikan Inventaris Kantor	



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BURHANUDDIN S.Ap, M.Ap.
Jabatan : Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. AHMAD ANSAR, M.Si
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 04 Januari 2022

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,



Drs. AHMAD ANSAR, M.Si

BURHANUDDIN, S.Ap, M.Ap.

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

PROGRAM : PENANGGULANGAN BENCANA

No	Sub Kegiatan	Indikator	Kegiatan	Hasil	Uraian
1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Pendataan dan pengambilan titik koordinat pada daerah rawan bencana	Jumlah daerah rawan bencana yang telah didata	Tersedianya data potensi daerah rawan bencana	
2	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Penebangan / pemangkasan pohon	Jumlah pohon yang ditebang/di pangkas yang berpotensi menimbulkan dampak bencana pohon tumbang	Tertanganinya pohon yang berpotensi menimbulkan bencana / pohon tumbang	
3	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Pemasangan rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul, dan rambu informasi bencana pada daerah rawan bencana	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitas pencegahan dan kesiapsiagaan	Terpasangnya rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul, dan rambu informasi bencana pada daerah rawan bencana	

Benteng, 04 Januari 2022

Kabid. Pencegahan & Kesiapsiagaan,

BURHANUDDIN, S.AP.,M.A.P
 Nip : 19690121 199003 1 011

Mengetahui :
 Kepala Pelaksana BPBD,

Drs. AHMAD ANSAR, M.Si
 Nip : 19730406 199203 1 002

[illegible]



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANDI BAHARUDDIN, SE**
Jabatan : **Kabid. Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. AHMAD ANSAR, M.Si**
Jabatan : **Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Drs. AHMAD ANSAR, M.Si

Benteng, 04 Januari 2022

Pihak Pertama,

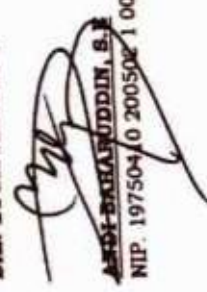
ANDI BAHARUDDIN, SE.

PERJANJIAN KERJA 2022
BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

No	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KELOMPOK	HASIL	KT
A	PELAYANAN, PENCEBAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	Persentasi penanganan korban bencana			
1.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil Tim Reaksi Cepat yang terlatih	1 (satu) Laporan Personil Tim Reaksi Cepat yang terlatih	Tersedianya SDM Tim Reaksi Cepat yang terlatih sebanyak 20 Orang	
B	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	Persentasi penanganan korban bencana			
1.	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Pembelian bantuan stimulan bagi korban bencana	1 (satu) Laporan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tersedianya Pembelian stimulan, logistik dan kaji cepat bagi korban bencana sebanyak 40 KK	
2.	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Penanganan Korban Bencana	1 (satu) Laporan dalam penanganan Korban Bencana	Terlaksananya Penanganan Korban Bencana	
3.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Logistik dan peralatan yang diperoleh dari pemerintah Provinsi dan BNPB serta Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi oleh Daerah	1 (satu) Laporan Ketersediaan Logistik dan Peralatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab./Kota	Terlaksananya Penanganan Logistik dan Peralatan serta Penyediaan Logistik di Daerah	
4.	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Aktivasi Sistem Komando	1 (satu) Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando	Terlaksananya Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando	

Benteng, 04 Januari 2022
**KEPALA BIDANG KEDARURATAN
DAN LOGISTIK BPSD,**


KEPALA PELAKSANA BPSD,
Drs. AHMAD ANSAR, M.Si
NIP. 19730406 199203 1 002


AGUS SETIAWAN, S.P.
NIP. 19750410 200502 1 005

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK TA 2022

[illegible]

4. Jumlah Bantuan Logistik dan peralatan yang diperoleh dari pemerintah Provinsi dan BNPB serta Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi oleh Daerah	1. Membuat SK Tim Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 2. Menerima laporan kejadian bencana dari masyarakat maupun Pemerintah 3. Meneruskan laporan keatas / Pimpinan 4. Melakukan koordinasi Menindaklanjuti kejadian/peristiwa bencana 6. Melakukan Pencarian, Pertolongan dan evakuasi Korban Bencana 7. Membuat laporan	Rp 64.810.500
	1. Membuat SK TIM Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 2. Membuat Proposal Permintaan Bantuan Peralatan dan Logistik 3. Mengantar Proposal 4. Menerima Rekomendasi Proposal Permintaan Bantuan Peralatan dan Logistik 5. Melakukan Koordinasi Penerimaan Bantuan 6. Menerima Bantuan Peralatan dan Logistik 7. Melakukan Penyediaan Logistik 8. Melakukan Inventarisasi Logistik 9. Membuat Laporan	Rp 84.191.500



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAIFUL BAHRI, ST.
Jabatan : Kabid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar

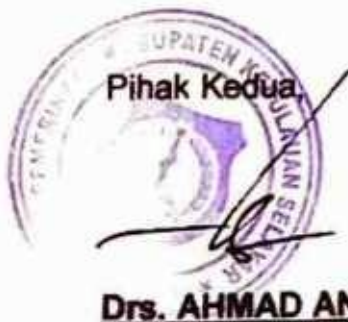
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs AHMAD ANSAR, M.Si
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,

Drs. AHMAD ANSAR, M.Si

Benteng, 04 Januari 2022

Pihak Pertama,



SYAIFUL BAHRI, ST.

**PERJANJIAN KINERJA
BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	SUB BAGIAN	INDIKATOR	PELUKSI	HASIL
1.	Penanganan kabupaten/kota	1. Peninjauan dan assesment	Jumlah rumah yang ditinjau dan disasement	Data nilai kerusakan dan kebutuhan atap seng
		2. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat pascabencana	Jumlah rumah yang mendapat bantuan perbaikan atap seng	Data rumah yang mendapat bantuan perbaikan atap seng
		3. Monitoring dan evaluasi	Jumlah rumah yang telah memanfaatkan dan belum memanfaatkan bantuan perbaikan rumah	Tersediaanya laporan hasil monitoring dan evaluasi
		4. Koordinasi dan konsultasi penanganan pascabencana	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi penanganan pascabencana	Tersediaanya laporan hasil koordinasi dan konsultasi
		5. Pendampingan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi	Jumlah dokumen pendampingan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi	Terlaksananya pendampingan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi
		6. Rekonstruksi Tanggul Pengaman Pantai Desa Buki Kec. Buki dan Rekonstruksi Tanggul Pengaman Sungai Barugaiya Kec. Bontomanai	Panjang Tanggul Pengaman Pantai Desa Buki Kec. Buki dan Tanggul Pengaman Sungai Barugaiya Kec. Bontomanai yang terbangun	Terlindungnya rumah penduduk dan aset dari kerusakan akibat gelombang pasang dan banjir

Bonteng, 04 Januari 2022

KEPALA BIDANG REHABILITASI
DAN REKONSTRUKSI,

SYAIFUL BAHRI, S.T.
NIP. 19730125 200701 1 013



Drs. AHMAD ANSAR, M. SI.
NIP. 19730406 199203 1 002

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	

- : PENANGGULANGAN BENCANA
- : PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA
- : PENANGANAN PASCA BENCANA KABUPATEN / KOTA

[illegible]

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN (Rp.)	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
				JAN	FEB	MAR	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
5.	Pendampingan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi	1. Pembuatan dokumen pengadaan pengawasan teknis; 2. Pelaksanaan pengawasan teknis; 3. Pembuatan laporan pelaksanaan dan pengawasan 4. teknis; 5. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pendampingan dana hibah; 6. Pembuatan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pendampingan.														
6.	Rekonstruksi Tanggul Pengaman Pantai Desa Buki Kec. Buki dan Rekonstruksi Tanggul Pengaman Sungai Barugaiya Kec. Bontomanai	1. Pembuatan SK Tim Teknis; 2. Pembuatan dokumen pengadaan pelaksanaan kegiatan; 3. Pelaksanaan kegiatan Rekonstruksi Tanggul Pengaman Pantai Desa Buki Kec. Buki dan Rekonstruksi Tanggul Pengaman Sungai Barugaiya Kec. Bontomanai; 4. Pembuatan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.														

Benteng, 04 Januari 2022

KEPALA BIDANG REHABILITASI
DAN REKONSTRUKSI,

SYAIFUL BAHRI, S.T.
NIP. 19730125 200701 1 013

KEPALA PELAKSANA BPBD,



DR. AHMAD ANSAR, M. Si.
NIP. 19730406 199203 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALAMUDDIN, S.Pd.
Jabatan : Kasubag. Hukum Perencanaan dan Pelaporan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ROSA INDAH HASAN, SP.
Jabatan : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 04 Januari 2022

Pihak Kedua,

ROSA INDAH HASAN, SP.

Pihak Pertama,

ALAMUDDIN, S.Pd.

**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KASUBAG. HUKUM PERENCANAAN DAN PELAPORAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
KEGIATAN : PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

No	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KELOMPOK	HASIL	
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	a. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Dokumen	Tersedianya dokumen RENJA	
		b. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022	Dokumen	Tersedianya dokumen perjanjian kinerja tahun anggaran 2022	
2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Dokumen	Tersedianya dokumen RKA	
3	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP)	Dokumen	Tersedianya dokumen RKAP	
4	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	a. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Dokumen	Tersedianya dokumen DPA	
5	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA SKPD	a. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPAP)	Dokumen	Tersedianya dokumen DPAP	
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a. Penyusunan LAKIP	Dokumen	Tersedianya dokumen LAKIP	
		b. Penyusunan LKPJ	Dokumen	Tersedianya dokumen LKPJ	

	c. Penyusunan LPPD	Dokumen	Tersedianya dokumen LPPD	
	d. Penyusunan Buku Profil BPPD	Dokumen	Tersedianya dokumen Buku Profil BPPD	
	e. Penyusunan SPM	Dokumen	Tersedianya dokumen SPM	

SEKRETARIS BADAN,

Rosa Indah Hasan

ROSA INDAH HASAN, SP.
NIP. 19750218 200604 2 016

Benteng, 4 Januari 2022

KASUBBAG. HUKUM PERENCANAAN DAN
PELAPORAN,

Alamuddin S.Pd

ALAMUDDIN, S.Pd.
NIP. 19650515 198602 1 018

**WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
KASUBAG. HUKUM PERENCANAAN DAN PELAPORAN**

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 - 21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI LAPANG, SP.
Jabatan : Kasubag. Keuangan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ROSA INDAH HASAN, SP.
Jabatan : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 04 Januari 2022

Pihak Kedua,

ROSA INDAH HASAN, SP.

Pihak Pertama,

ANDI LAPANG, SP.

**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KASUBAG. KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN : 1. PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
2. ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

KINDIRYAN		KINDIRYAN		KINDIRYAN		KINDIRYAN	
KINDIRYAN		KINDIRYAN		KINDIRYAN		KINDIRYAN	
1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RPFK) SKPD	1 (satu) Dokumen	Tersedianya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan sebanyak 12 (Duabelas) Laporan			
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 (satu) Dokumen	Tersedianya gaji dan tunjangan bag ASN selama 1 (satu) tahun			
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 (satu) Laporan	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun sebanyak 1 (satu) Laporan			
4	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan BPK dan Inspektorat	1 (satu) Laporan	Tersedianya dokumen dan bahan tanggapan pemeriksaan.			

Benteng, 4 Januari 2022

KASUBAG. KEUANGAN,

SEKRETARIS,

ROSA INDAH HASAN, S.P.
NIP. 19750218 200604 2 016


APRI LAPANG, S.P.
NIP. 19681102 200604 1 011



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Hj. NURMIATI B
Jabatan : Kasubag. Umum dan Kepegawaian
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ROSA INDAH HASAN, SP.
Jabatan : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 04 Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

ROSA INDAH HASAN, SP.

Dra. Hj. NURMIATI B

PERJANJIAN KURIERJA
BADAN PERANGGULANGAN BENCAHA DAERAH
KASUBAG. UMUM DAN KEPENGAWALAN
TAHUN ANGGARAN 2022

PROGRAM : PENUNJANG URUBAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KETERANGAN		TIDAK TERJADI		KETERANGAN	KETERANGAN	KETERANGAN
1	Pemenuhan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyediaan laporan aset SKPD	2 Laporan	Tersedianya laporan aset SKPD		
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi melalui Bimtek	4 (tiga) orang Pegawai yang mengikuti Bimtek 4 orang	Tersedianya Peningkatan Kompetensi teknis Pegawai yang mengikuti Bimtek 4 orang		
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	8 komponen alat listrik yang terpasang	Tersedianya komponen alat listrik yang terpasang sebanyak 93 buah		
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	22 Buah barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7 (tujuh) tabloid Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10 tabloid		
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam & Luar Daerah	1 laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Tersedianya Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam & Luar Daerah		
7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit Peralatan dan mesin lainnya yang dapat disediakan	Tersedianya Peralatan dan mesin lainnya 3 Unit		
8	Pengadaan aset tetap lainnya	Penyediaan aset tetap lainnya	26 Buah aset tetap lainnya yang disediakan	Tersedianya aset tetap lainnya		

9	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	1 Dokumen	Tersedianya dokumen surat menyurat
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 unit layanan jasa komunikasi, air & listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air & listrik 4 unit layanan
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 (satu) Laporan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	1 (satu) Unit Mobil Jabatan yang dipelihara	Terlaksananya pemeliharaan Mobil Jabatan 1 Unit
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Iapangan	Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	1 (satu) Laporan	Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional 23 Unit
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 (satu) Laporan	Terlaksananya pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya 22 Unit
15	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pelaksanaan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 (satu) Laporan	Terlaksananya pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor 1 Unit

Benteng, 4 Januari 2022

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN.

SEKRETARIS.

Rosa Indah Hasan, SP.

ROSA INDAH HASAN, SP.
NIP. 19750218 200614 2 016

Drs. H. Kurniati B.

Drs. H. KURNIATI B.
NIP. 19680104 199603 2 003

**WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAJAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

[illegible]

3.	Penyediaan kebutuhan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan	1. Menertima Surat Pernyataan Perawatan	Rp 7.500.000
		2. Mengajukan Pernyataan Media Kepada Pimpinan	
		3. Identifikasi pernyataan media	
		4. Membuat data anggaran media	
		5. Menertima kerangka pembayaran dari media	
		6. Mengajukan pembayaran kepada bendahara	
		7. Melakukan pembayaran kepada media	
4.	Pelaksanaan Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam & Luar Daerah	1. Menertima Surat Undangan/Pengajian	Rp 250.000.000
		2. Mencatat Agenda Surat Masuk	
		3. Konfirmasi ke Tingkat Atas	
		4. Menertima Disposisi	
		5. Membuat ST/SPD	
		6. Mengikuti Acara Sesuai Surat Tugas	
		7. Membuat Laporan	
		8. Melaporkan SPJ	
P	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1		1. Membuat nota pesanan	Rp 65.850.000
		2. Membuat berita acara penerimaan barang	
		3. Membuat berita acara pemeriksaan barang	
		4. Membuat kerangka pembayaran	
2	Penyediaan Alat Tetap Lainnya	1. Membuat nota pesanan	Rp 50.440.000
		2. Membuat berita acara penerimaan barang	
		3. Membuat berita acara pemeriksaan barang	
		4. Membuat kerangka pembayaran	
Q	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Menertima surat masuk	Rp 2.800.000
		2. Mengajukan surat masuk	
		3. Memberikan lembar disposisi	

		4 Mengantar surat ke ruangan sekretaris untuk diproses	
		5 Mengantar surat ke ruangan Kepala untuk diproses	
		6 Mendistribusikan surat yang sudah di proses	
		7 Mengorder surat bahan	
		8 Membuat nomor surat keluar	
		9 Mengantar surat	
2	Pemeliharaan Jasa Komunikasi, Sertifikasi Daya Air dan Listrik	1. Mengorder Daftar Tagihan bulanan 2. Mengajukan Tagihan Kepada Bendahara	Rp 111.000.000
3	Pemeliharaan Jasa Pelayanan Umum Berkelanjutan	1. Penyediaan ATK 2. Melaksanakan Urusan Burnt Mengurus 3. Pembuatan BK PPTK 4. Pembuatan BK Petugas Pengabdian Administrasi Belanja Pegawai 5. Pengurusan Tenaga Kontrak 6. Pengurusan PA, PPK SKPD, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang 7. Pembayaran honorarium Pertanggungjawaban Keuangan PA, PPK SKPD, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang, Petugas Pengabdian Administrasi Belanja Pegawai, PPTK 8. Distribusi Surat Menyurat	Rp 148.808.850
11	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penyusung Urusan Pemerintahan Daerah		
1	Pemeliharaan Pemeliharaan Kenderaan Dinas Jajaran	1. Identifikasi Kebutuhan 2. Penarikan Berkas Kenderaan 3. Pengurusan Buku Cadang 4. Servis 5. Pengisian BBM/Pelumas Oli	Rp 40.000.000
2	Pemeliharaan Pemeliharaan Kenderaan Dinas Operasional	1. Identifikasi Kebutuhan 2. Penarikan Berkas Kenderaan 3. Pengurusan Buku Cadang 4. Servis	Rp 165.000.000



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAHRUL, SE.
Jabatan : Analis Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BURHANUDDIN, S.Ap, M.Ap.
Jabatan : Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

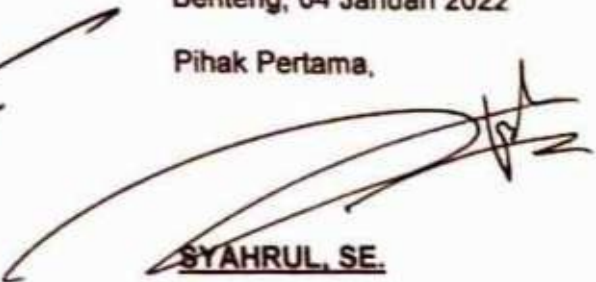
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 04 Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


BURHANUDDIN, S.Ap, M.Ap.


SYAHRUL, SE.

**PERJANJIAN KINERJA
ANALIS KEBENCANAAN
BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

PROGRAM : PENANGGULANGAN BENCANA
KEGIATAN : PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA

No	Sub Kegiatan	Indikator	Tercapainya	Rincian	KMT
1	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Pencabangan / pemangkasan pohon	Jumlah pohon yang ditebang/di pangkas yang berpotensi menimbulkan dampak bencana pohon tumbang	Tertanganinya pohon yang berpotensi menimbulkan bencana / pohon tumbang	

Mengetahui :
Kabid. Pencegahan & Kesiapsiagaan,

BURHANUDDIN, S.AP-M.A.P
Nip : 19690121 199003 1 011

Benteng, 04 Januari 2022
Analisis Kebencanaan,

SYAHRUL, SE.
Nip : 19740405 200701 1 037

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

REGIANTAN

SUB KEGIA

10

[illegible]

Kabid. Penceg.

Nip : 19690121 199003 1 011

Analisis Kebencanaan,

SYAHRUL, BE,

NIP : 19740405 200701 1 037



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : APRIANA USMAN, SE.
Jabatan : Analis Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BURHANUDDIN, S.AP, M.AP.
Jabatan : Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 04 Januari 2022

Pihak Kedua,

BURHANUDDIN, S.Ap. M.Ap.

Pihak Pertama,

APRIANA USMAN, SE.

**PERJANJIAN KINERJA
ANALIS KEBENCANAAN
BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

PROGRAM : PENANGGULANGAN BENCANA

No	Sub Kegiatan	Indikator	Kebijakan	Hasil	R/T
1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Pendataan dan pengambilan titik koordinat pada daerah rawan bencana	Jumlah daerah rawan bencana yang telah didata	Tersedianya data potensi daerah rawan bencana	
2	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Pemasangan rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul, dan rambu informasi bencana pada daerah rawan bencana	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitas pencegahan dan kesiapsiagaan	Terpasangnya rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul, dan rambu informasi bencana pada daerah rawan bencana	

Mengetahui :
Kabid. Pencegahan & Kesiapsiagaan

BURHANUDDIN, S.A.P., M.A.P
Nip : 19690121 199003 1 011

Benteng, 04 Januari 2022

Analisis Kebencanaan,

APRIANA USMAN, SE.
Nip : 19830430 201001 2 029

KO	BUDJETER	MENYUSUN	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN
No.	Diketahui	(Membuat)	(Anggaran)	Tgl. Mulai / Berakhir / Dst / Total
1	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan - Pemasangan rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul dan rambu informasi bencana pada daerah rawan bencana	Rp	-	
		1. Pembentukan tim pemasangan rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul, dan rambu papan informasi bencana		
		2. Rapat kerja tim terkait pemasangan rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul dan rambu informasi bencana		
		3. Koordinasi dengan pemerintah setempat (Camat/Lurah/Kepala Desa)		
		4. Penyediaan bahan kegiatan pemasangan rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul dan rambu informasi bencana		
2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota - Pendataan dan pengambilan titik koordinat pada daerah rawan bencana	Rp	-	
		1. Pembentukan tim pendataan dan pengambilan titik koordinat daerah rawan bencana		
		2. Rapat kerja tim terkait pendataan dan pengambilan titik koordinat daerah rawan bencana		

[illegible]



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. SITI MARYAM, S.Pd
Jabatan : Penata Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDI BAHARUDDIN, SE.
Jabatan : Kabid. Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 04 Januari 2022

Pihak Kedua,

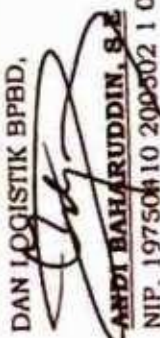
Pihak Pertama,


ANDI BAHARUDDIN, SE.


Hj. SITI MARYAM, S.Pd

PERJANJIAN KINERJA
PENATA PENANGGULANGAN BENCANA
BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK
TAHUN ANGGARAN 2022

No	KINDHAGUNAN	KEDURURATAN	KEDARURATAN	BENTENG	LOT
A	PELAYANAN, PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	Persentase penanganan korban bencana			
1.	Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil Tim Reaksi Cepat yang terlatih	1 (satu) Laporan Personil Tim Reaksi Cepat yang terlatih	Tersedianya SDM Tim Reaksi Cepat yang terlatih sebanyak 20 Orang	
B	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	Persentase penanganan korban bencana			
1.	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Pemberian bantuan stimulan bagi korban bencana	1 (satu) Laporan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tersedianya Pemberian stimulan, logistik dan kaji cepat bagi korban bencana sebanyak 40 KK	
2.	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Penanganan Korban Bencana	1 (satu) Laporan dalam penanganan Korban Bencana	Terlaksananya Penanganan Korban Bencana	
3.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Logistik dan peralatan yang diperoleh dari pemerintah Provinsi dan BNPB serta Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi oleh Daerah	1 (satu) Laporan Ketersediaan Logistik dan Peralatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab./Kota	Terlaksananya Penerimaan Logistik dan Peralatan serta Penyediaan Logistik di Daerah	
4.	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Aktivasi Sistem Komando	1 (satu) Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando	Terlaksananya Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando	

KEPALA BIDANG KEDARURATAN
DAN LOGISTIK BPBD,

ANDI BAHARUDDIN, S.E.
NIP. 19750410 200502 1 005

Benteng, 04 Januari 2022
PENATA PENANGGULANGAN BENCANA,


HJ. SITI MARYAM, S. Pd.
NIP. 19681101 200701 2 017

[illegible]

1.	Jumlah Personil Tim Reaksi Cepat	1. Membuat SK Tim Reaksi Cepat Penanganan Darurat Bencana 2. Membuat SK Tim Posko TRC Siaga Darurat Bencana 3. Melakukan Koordinasi mengenai Pengembangan kapasitas SDM TRC 4. Membuat Jadwal Posko 5. Melakukan Posko Jaga 1 X 24 Jam 6. Melakukan Monitoring 7. Melakukan Koordinasi ke BNPB/BPBD Provinsi terkait usulan pemanggilan diklat pengembangan SDM TRC 8. Menerima panggilan usulan peserta diklat pengembangan kapasitas SDM TRC 9. Membuat Laporan	-	Rp
2	Jumlah pemberian bantuan stimulan bagi korban bencana	1. Membuat SK Tim Sub kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 2. Menerima laporan kejadian bencana dari masyarakat maupun Pemerintah setempat 3. Menindaklanjuti kejadian/peristiwa bencana 4. Melakukan assesment/ kaji cepat 5. Memberikan bantuan stimulan/ logistik 6. Membuat laporan	-	Rp

3. Penanganan Korban Bencana	1. Membuat SK Tim Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 2. Menerima laporan kejadian bencana dari masyarakat maupun Pemerintah setempat 3. Meneruskan laporan keatas / Pimpinan 4. Melakukan koordinasi 5. Menindaklanjuti kejadian/peristiwa bencana 6. Melakukan Pencarian, Pertolongan dan evakuasi Korban Bencana 7. Membuat laporan	Rp	
4. Jumlah Bantuan Logistik dan peralatan yang diperoleh dari pemerintah Provinsi dan BNPB serta Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi oleh Daerah	1. Membuat SK TIM Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 2. Membuat Proposal Permintaan Bantuan Peralatan dan Logistik 3. Mengantar Proposal 4. Menerima Rekomendasi Proposal Permintaan Bantuan Peralatan dan Logistik 5. Melakukan Koordinasi Penerimaan Bantuan 6. Menerima Bantuan Peralatan dan Logistik 7. Melakukan Penyediaan Logistik 8. Melakukan Inventarisasi Logistik 9. Membuat Laporan	Rp	

[illegible]

Benteng, 04 Januari 2022

PENATA PENANGGULANGAN BENCANA,

KEPALA BIDANG KEDARURATAN
DAN LOGISTIK BPBD,

ANDI BAHARUDDIN, S.P.
NIP. 19750410 200582 1

HJ. SPTI MARYAM, S. Pd.
NIP. 19681101 200701 2 017



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : REY RIVALDI ALFONS, ST
Jabatan : Penata Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SYAIFUL BAHRI, ST
Jabatan : Kabid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 04 Januari 2022

Pihak Pertama,

REY RIVALDI ALFONS, ST.

Pihak Kedua,

SYAIFUL BAHRI, ST.

**PERJANJIAN KINERJA
PENATA PENANGGULANGAN BENCANA
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KELUARAN	HASIL
1.	Penanganan pascabencana kabupaten/kota	1. Peninjauan dan assesment	Jumlah rumah yang ditinjau dan diasessment	Data nilai kerusakan dan kebutuhan atap seng
		2. Monitoring dan evaluasi	Jumlah rumah yang telah memanfaatkan dan belum memanfaatkan bantuan perbaikan rumah	Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi
		3. Koordinasi dan konsultasi penanganan pascabencana	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi penanganan pascabencana	Tersedianya laporan hasil koordinasi dan konsultasi
		4. Pendampingan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi	Jumlah dokumen pendampingan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi	Terlaksananya pendampingan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi
		5. Rekonstruksi Tanggul Pengaman Pantai Desa Buki Kec. Buki dan Rekonstruksi Tanggul Pengaman Sungai Barugaya Kec. Bontomanai	Panjang Tanggul Pengaman Pantai Desa Buki Kec. Buki dan Tanggul Pengaman Sungai Barugaya Kec. Bontomanai yang terbangun	Terlindungnya rumah penduduk dan aset dari kerusakan akibat gelombang pasang dan banjir

Benteng, 04 Januari 2022

PENATA PENANGGULANGAN BENCANA,

KABID. REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI,


REY RIVALDI ALFONS, ST
NIP. 19871391 201101 1 009


SYAIFUL BAHRI, S.T.
NIP. 19730125 200701 1 013

PROGRAM

: PENANGGULANGAN BENCANA

KEGIATAN

: PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA

SUB KEGIATAN

: PENANGANAN PASCA BENCANA KABUPATEN / KOTA

[illegible]

No	Kategori	Aktivitas	Anggaran (Rp)	Waktu Pelaksanaan											
				JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DES
5	Rekonstruksi Pengaman Pantai Desa Bukid Kec. Bukid dan Rekonstruksi Tanggul Pengaman Sungai Barugaiya Kec. Bontomanai	1. Pembuatan SK Tim Teknis; 2. Pembuatan dokumen pengadaaan pelaksanaan kegiatan; 3. Pelaksanaan kegiatan Rekonstruksi Tanggul Pengaman Pantai Desa Bukid Kec. Bukid dan Rekonstruksi Tanggul Pengaman Sungai Barugaiya Kec. Bontomanai; 4. Pembuatan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.													

Bente Bonteng, 04 Januari 2022
PENATA PENANGGULANGAN BENCANA


RIZKI RIVALDI ALPHONSE, ST
NIP. 19871301 201101 1 009

KABID. REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI,


SYARIFUL BAHRI, S.T.
NIP. 19730125 200701 1 013



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : RAJA DEWI, S. Sos
Jabatan : Penata Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SYAIFUL BAHRI, ST
Jabatan : Kabid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 04 Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SYAIFUL BAHRI, ST.

RAJA DEWI, S. Sos.

**PERJANJIAN KINERJA
PENATA PENANGGULANGAN BENCANA
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	LOKUS KEGIATAN	INDIKATOR	KELUARAN	HASIL
1.	Penanganan pascabencana kabupaten/kota	1. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat pascabencana	Jumlah rumah yang mendapat bantuan perbaikan atap seng	Data rumah yang mendapat bantuan perbaikan atap seng

KABID. REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI,



SYAIFUL BAHRI, S.T.
NIP. 19730125 200701 1 013

Benteng, 04 Januari 2022

PENATA PENANGGULANGAN BENCANA,



RAJA DEWI, S. Sos
NIP. 19650101 200502 2 005

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

PROGRAM : PENANGGULANGAN BENCANA
 KEGIATAN : PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA
 SUB KEGIATAN : PENANGANAN PASCABENCANA KABUPATEN/KOTA

(6)	INDEKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN (Rp.)	WAKTU PELAKSANAAN											
				JAN	FEB	MAR	APRIL	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OKT	NOV	DES
1	Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat pascabencana	1. Pembuatan surat tugas; 2. Pembuatan kelengkapan administrasi pemberian bantuan; 3. Penandatangan Berita Acara, SKTJM, Pakta Integritas dan NPHD; 4. Pembuatan SK penerima bantuan; 5. Pembuatan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.													

Benteng, 04 Januari 2022

PENATA PENANGGULANGAN BENCANA,

KABID. REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI,


RAJA DEWL. S. Sos
 NIP. 19650101 200502 2 005


SYAIFUL BAHRI, S.T.
 NIP. 19730125 200701 1 013



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERIYANTO, S.A.P.
Jabatan : Penata Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDI LAPANG, SP.
Jabatan : Kasubag. Keuangan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 04 Januari 2022

Pihak Kedua,


ANDI LAPANG, SP.

Pihak Pertama,


HERIYANTO, S.A.P.

[illegible]

3	Membuat Laporan Bulanan penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas Rutin dan rekapitulasi pelaksanaan perjalanan dinas lingkungan Badan	1 Menerima disposisi dari atasan 2 Mengumpulkan data, informasi dan bahan terkait realisasi perjalanan dinas 3 Mengetik dan mencetak rekapitulasi laporan bulanan penggunaan anggaran perjalanan dinas Badan	
4	Membuat laporan realisasi anggaran setiap bulan dan triwulan	1 Menerima disposisi dari atasan 2 Mengumpulkan data, informasi dan bahan terkait realisasi anggaran 3 Mengetik dan mencetak laporan realisasi anggaran 4 Melakukan rekapitulasi ke BAKUDA	
5	Membuat laporan neraca badan setiap triwulan dan akhir tahun	1 Menerima disposisi dari atasan 2 Mengumpulkan data, informasi dan bahan terkait neraca badan 3 Mengetik dan mencetak laporan neraca badan	
6	Memeriksa kelengkapan berkas surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan di lingkungan Badan	1 Menerima berkas SPJ dari Pejabat Pembuat Komitmen	



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BAKRI BAHAR, S. Kom.
Jabatan : Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
Bencana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Hj. NURMIATI B
Jabatan : Kasubag. Umum dan Kepegawaian Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 04 Januari 2022

Pihak Kedua,

Dra Hj. NURMIATI B.

Pihak Pertama,

BAKRI BAHAR, S. Kom.

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN ANALIS SDM APARATUR TAHUN ANGGARAN 2022

Kegiatan		Bulan												Total	
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agst	Sept	Oktr	Nov	Dek		
1.	Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyisipan bahan, koordinasi penyusunan laporan di bidang kepegawalan														100%
	1. Mengumpulkan data dan bahan perencanaan kerja kepegawalan setiap tahun														
	2. Membuat perencanaan kerja kepegawalan setiap tahun														
	3. Mengelola kinerja pegawai														
	4. Menyusun dokumen penilaian sasaran kinerja pegawai														
	5. Membuat laporan pelaksanaan tugas setiap bulan														

Bonteng, 4 Januari 2022

ANALIS SDM APARATUR,



BAKRI BAHAR, S. Kom.

NIP. 19770617 201001 1 004

KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWALAN,



Dra. Hj. MURTIATI B.

NIP. 119680104 199603 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RANI ENDANG ASTUTI, S.Sos.
Jabatan : Analis Mitigasi Bencana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BURHANUDDIN, S.Ap, M.A.P.
Jabatan : Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

BURHANUDDIN. S.Ap. M.A.P.

Benteng, 04 Januari 2022

Pihak Pertama,

RANI ENDANG ASTUTI, S. Sos.

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

PROGRAM

: PENANGGULANGAN BENCANA

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN											
				JAN	FEB	MAR	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
1	Pengelolaan resiko bencana Kab/Kota	1. Rapat kerja Tim terkait pelaksanaan kegiatan Pengelolaan resiko bencana Kab/Kota (penebangan / pemangkasan pohon)													
		2. Ikut serta dalam kegiatan pemantauan Pengelolaan resiko bencana Kab/Kota (penebangan / pemangkasan pohon)													
		3. Melaksanakan kegiatan administrasi Pengelolaan resiko bencana Kab/Kota (terkait surat permintaan penebangan													
2	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	- Pemasangan rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul, dan rambu informasi bencana pada daerah rawan bencana													
		1. Mengikuti rapat kerja tim terkait pemasangan rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul, dan rambu papan informasi bencana													
3	Sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota	2. Membantu Atasan dalam pelaksanaan kegiatan pemasangan rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul dan rambu informasi bencana													
		1. Ikut serta dalam rapat kerja tim terkait pendataan dan pengambilan titik koordinat daerah rawan bencana													

[illegible]

Benteng, 03 Februari 2022

Mengetahui :

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Analisis Mitigasi Bencana

BURHANUDDIN, S. P., M.A.P.

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP : 19690121 199003 1 011

RANI ENDANG ASTUTI, S.Sos

Pangkat : Penata Muda, III/a

NIP : 19950501 202012 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 - 21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : SUARDI

Jabatan : Pengadministrasi Umum Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SYAIFUL BAHRI, ST.

Jabatan : Kabid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 04 Januari 2022

Pihak Kedua,

SYAIFUL BAHRI, ST.

Pihak Pertama,

SUARDI

**WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADMINISTRASI UMUM
TAHUN ANGGARAN 2022**

KOMPETENSI		AKTIVITAS	ALOKASI WAKTU	WAKTU YANG DIBUTUHKAN	WAKTU YANG TERSEDIA	PERSENTASE
1.	Melakukan kegiatan ketatausahaan yang meliputi persuratan dan nota dinas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran kegiatan perkantoran	1. Mempersiapkan surat dinas dan memo dinas pimpinan	Rp			100%
		2. Mengagendakan surat dinas				
		3. Mendistribusikan surat dinas sesuai disposisi pimpinan				
2	Menyelenggarakan administrasi kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas	1. Meneliti kelengkapan berkas yang terkait dengan urusan kepegawaian				
		2. Menyiapkan surat yang terkait dengan urusan kepegawaian				
		3. Mengendalikan surat dinas yang terkait dengan urusan kepegawaian				
3	Melakukan penyimpanan arsip persuratan dan kepegawaian secara tertib agar mudah ditemukan saat diperlukan	1. Memilah dokumen persuratan yang terkait dengan urusan kepegawaian				
		2. Melakukan penyimpanan berkas/dokumen yang terkait dengan urusan kepegawaian				
		3. Melakukan pemeliharaan dokumen/arsip kepegawaian				



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 - 21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **TAUFIQ. Z**
Jabatan : **Pengadministrasi Umum Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANDI BAHARUDDIN, SE.**
Jabatan : **Kabid. Kedaruratan dan Logistik
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 04 Januari 2022

Pihak Kedua,


ANDI BAHARUDDIN, SE.

Pihak Pertama,


TAUFIQ. Z

TAHUN ANGGARAN 2022

[illegible]



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ABD. RAHMAN NUR

Jabatan : Pengadministrasi Umum Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDI LAPANG, SP

Jabatan : Kasubag. Keuangan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

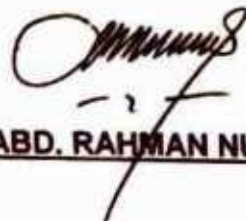
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 04 Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


ANDI LAPANG, SP.


ABD. RAHMAN NUR

**WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADMINISTRASI UMUM
TAHUN ANGGARAN 2022**

[illegible]

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 - 2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2022 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran

yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Pengukuran indikator kinerja menggunakan penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) dari masing-masing indikator kinerja sebagaimana ditetapkan melalui realisasi yang berhasil dicapai pada indikator dimaksud, maka penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Dalam kondisi :

1. semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:

$$\frac{\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian}}{\text{Realisasi Rencana}} \times 100\%$$

2. semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi Rencana}}{\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian}} \times 100\%$$

Persentase pencapaian rencana tingkat capaian	$\frac{\text{Rencana - (Realisasi - Rencana)}}{\text{Rencana}} \times 100\%$
--	--

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan

Dalam dokumen Renstra 2021 - 2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah ditetapkan sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 30 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 21 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 9 indikator

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman

Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 62 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Adapun Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, adalah :

1. Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana :
 - a. Cakupan ketersediaan naskah kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
 - a. Persentase penurunan jumlah korban bencana yang mengalami kematian pada saat penanganan
 - b. Persentase penurunan resiko Bencana
2. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
 - a. Respon Time Penanganan Korban Bencana
 - b. Indeks kapasitas Penanganan Bencana
3. Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
 - a. Cakupan rehabilitas pasca Bencana
 - b. Cakupan rekonstruksi pasca Bencana

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, dilakukan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Laporan pertanggungjawaban keuangan ini disampaikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Arus Kas; dan
4. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun anggaran 2022 sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003. Tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD), dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pada tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan 2 Program, 11 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.16.646.569.300,- (Enam belas milyar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah P nanggung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kerja pada Akhir Periode				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai SAKIP OPD			CC	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2,480,776,300		2,778,184,459		3,208,208,983		3,308,717,481		3,400,664,540		3,400,664,540			BPBD	Kab. Kep. Selayar
			Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun		20,160,000		22,832,000		24,000,000		25,000,000		27,500,000		27,500,000					
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022	2 Dokumen	3,599,000	2 Dokumen	3,950,000	2 Dokumen	4,440,000	2 Dokumen	4,540,000	2 Dokumen	5,040,000		5,040,000					
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	2,071,000	1 Dokumen	2,936,000	1 Dokumen	2,200,000	1 Dokumen	2,300,000	1 Dokumen	2,500,000		2,500,000					
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Tersusunnya Dokumen RKAP SKPD	1 Dokumen	2,071,000	1 Dokumen	2,936,000	1 Dokumen	2,200,000	1 Dokumen	2,300,000	1 Dokumen	2,500,000		2,500,000					
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	2,071,000	1 Dokumen	2,936,000	1 Dokumen	2,200,000	1 Dokumen	2,300,000	1 Dokumen	2,500,000		2,500,000					
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Tersusunnya Dokumen DPAP SKPD	1 Dokumen	2,071,000	1 Dokumen	2,936,000	1 Dokumen	2,200,000	1 Dokumen	2,300,000	1 Dokumen	2,500,000		2,500,000					
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Tersusunnya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) SKPD	1 Dokumen	3,900,000	1 Laporan	3,750,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,200,000	1 Dokumen	5,500,000		5,500,000					

			Kinerja SKPD															
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen LAKIP, LKPI,LPPD, Buku profil BPBD dan SPM	5 Dokumen	4,377,000	4 Laporan	3,388,000	5 Dokumen	5,760,000	5 Dokumen	6,060,000	5 Dokumen	6,960,000		6,960,000		
		Meningkatnya kualitas pelayanan kepada Masyarakat	Indeks kepuasan Masyarakat		0.67	0.68		0.69		0.7		0.71		0.72		0.72		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,703,898,000		1,791,797,459		2,020,587,978		2,025,310,476		2,036,672,535		2,036,672,535		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Dokumen	1,693,998,000	19 Orang/bulan	1,776,147,459	1 Laporan	2,006,587,978	1 Laporan	2,011,310,476	1 Laporan	2,018,172,535		2,018,172,535		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD	1 Laporan	7,200,000	1 Laporan	11,342,000	1 Dokumen	11,000,000	1 Dokumen	11,000,000	1 Dokumen	15,500,000		15,500,000		
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggap	Tersedianya Dokumen dan Bahan Tanggap Pemeriksaan	1 Laporan	2,700,000	1 Dokumen	4,308,000	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	3,000,000		3,000,000		
			Pengadaan Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah			3,000,000		8,050,000		10,000,000		12,000,000		14,000,000		14,000,000		
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan Aset SKPD	2 Laporan	3,000,000	12 Laporan	8,050,000	12 Dokumen	10,000,000		12,000,000		14,000,000		14,000,000		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			18,000,000		-		25,000,000		27,500,000		30,000,000		30,000,000		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Teknis Pegawai yang Mengikuti Bimtek 4 Orang	4 Orang	18,000,000		-	5 Orang	25,000,000	5 Orang	27,500,000	6 Orang	30,000,000		30,000,000		
		Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Keuangan OPD sesuai SAP		sesuai		sesuai		sesuai		sesuai		sesuai		sesuai			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah			220,314,000		238,557,000		335,000,000		355,000,000		373,585,000		373,585,000		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen alat listrik yang terpasang sebanyak 93 buah	8 Komponen	5,478,000	1 Paket	11,053,000	9 komponen	10,000,000	9 komponen	10,000,000	9 komponen	10,000,000		10,000,000		
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	22 buah	6,800,000	1 Paket	12,500,000	40 Lembar	10,000,000	40 Lembar	10,000,000	52 Lembar	13,000,000		13,000,000		
			Penyediaan Bahan	Tersedianya Bahan Bacaan														

			Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	dan Peraturan Perundang-undangan 10 Tabloid		7 Tabloid	6,350,000	8 Layanan	12,500,000	10 Tabloid	10,000,000	10 Tabloid	10,000,000	-	-	-		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah		1 Laporan	201,686,000	400 Laporan	202,504,000	450 kali	305,000,000	475 kali	325,000,000	500 kali	350,585,000		350,585,000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				85,930,500		75,048,000		-		25,000,000		42,000,000		42,000,000	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya 3 Unit		3 Unit	52,640,500	3 Unit	64,656,000	-	-	3 Unit	25,000,000	3 Unit	27,000,000		27,000,000	
			Pengadaan Mebel	Tersedianya Meubeler kursi rapat sebanyak 20 buah		-	-	20 Buah	10,392,000	-	-	-	-	1 Unit	15,000,000		15,000,000	
			Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya		26 Buah	33,290,000	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				195 7 6 0 , 9 ,8 0		326 8 0 0 , 8 ,0 0		532 0 3 0 , 0 ,8 0		562 0 3 0 , 0 ,8 0		582 0 3 0 , 0 ,8 0		582 0 3 0 , 0 ,8 0	
			Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Dokumen Surat Menyurat		1 Dokumen	2,800,000	1 Laporan	5,790,000	1000 surat	7,500,000	1000 surat	8,500,000	1000 surat	10,000,000		10,000,000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik 3 unit layanan		3 Unit Layanan	87,631,400	1 Laporan	133,336,000	4 Unit	124,503,800	4 Unit	130,003,800	4 Unit	135,003,800		135,003,800	
			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor		1 Laporan	105,365,400	1 Laporan	187,754,000	6 Layanan	400,000,000	6 Layanan	423,500,000	6 Layanan	437,000,000		437,000,000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				233,677,000		315,020,000		261,617,205		276,903,205		294,903,205		294,903,205	
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau	Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan 1 unit														

			kendaraan dinas			1 unit	40,000,000	1Unit	40,950,000	1 Unit	41,617,205	1 Unit	43,903,205	1 Unit	49,903,205		49,903,205		
			Jabatan																
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan dinas/operasional 23 unit		1 Laporan	131,370,000	20 Unit	191,190,000	20 Unit	185,000,000	20 Unit	190,000,000	20 Unit	195,000,000		195,000,000		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 22 unit		1 Laporan	30,507,000	1 Unit	19,420,000	14 Unit	20,000,000	14 Unit	23,000,000	14 Unit	25,000,000		25,000,000		
			Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terlaksananya pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor 1 unit		1 unit	31,800,000	1 Unit	63,460,000	1 Unit	15,000,000	1 Unit	20,000,000	1 Unit	25,000,000		25,000,000		
	Mewujudkan Perlindungan Masyarakat dalam upaya penanggulangan Bencana		Persentase layanan kebencanaan pada masyarakat (pra bencana, tanggap darurat dan pasca Bencana)			100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				14,165,793,000		1,848,048,450		904,835,590		909,939,360		1,105,536,089		1,105,536,089		
			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/kota	Persentase Penanganan Korban Darurat Bencana			42,294,000		440,890,000		44,415,600		42,500,000		86,080,100		86,080,100		
			Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/kota	Pelaksanaan Penyusunan Kajian Resiko Bencana		-	-	1 Dokumen	350,690,000	-	-	-	-	-	-		-		
			Sosialisasi, komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	Tersedianya data potensi daerah rawan bencana															

			Kabupaten/kota (per jenis kegiatan)		2 Kecamatan	42,23,968	100 Orang	90,200,000	50 Orang	44,415,600	50 Orang	42,500,000	100 Orang	86,080,100		86,080,100			
		Meningkatnya kualitas pelayanan kebencanaan	Persentase layanan Pengurangan resiko bencana pada masyarakat		100%		100%		100%		100%		100%		100%				
			Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Cakupan penanganan wilayah manajemen bencana			13 824 6 0 50 , , 9 , 0	1 52 233 5 ,0 , , 4 0		667 1 3 9 , 2 ,8 0		666 5 2 6 , 8 ,2 0		811 0 8 8 , 9 ,6 9		811 0 8 8 , 9 ,6 9			
			Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang disediakan		-	- 348 unit	133,270,000	-	-	-	-	348 unit	109,500,000		109,500,000			
			Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten/kota	Tertanganinya pohon yang berpotensi menimbulkan bencana/pohon tumbang		50 Pohon	112,901,000	50 Pohon	155,320,000	40 Pohon	80,000,000	50 Pohon	100,000,000	50 Pohon	100,000,000		100,000,000		
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk pencegahan dan Kesiapsiagaan	Terpasangnya rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul, dan rambu informasi bencana pada daerah rawan bencana		1 Desa	50,182,000	1 Kawasan	47,800,000	3 Desa	100,000,000	2 Desa	72,537,750	2 Desa	100,000,000		100,000,000		
			Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/kota	Jumlah penanganan pasca bencana yang terpenuhi		1 Tahun	13,605,075,000	1 Dokumen	653,161,450	75 KK	363,942,890	100 KK	369,346,060	100 KK	375,400,239		375,400,239		
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana kabupaten/kota	Tersedianya SDM Tim Reaksi Cepat yang terlatih sebanyak 20 Orang		20 Orang	56,532,500	15 Orang	62,682,000	30 Orang	123,181,000	30 Orang	124,698,450	30 Orang	126,198,450		126,198,450		
			Persentase Korban bencana yang tertangani		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			Pelayanan Penyelamatan dan Evauasi Korban	Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban bencana			298,808,500		301,812,000		193,296,100		200,857,100		208,357,300		208,357,300		

			Bencana															
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/kota	Tersedianya pemberian stimulan, logistik dan kaji cepat bagi orban bencana sebanyak 40 kk		1 Laporan	164,769,500	1 Dokumen	232,374,000	60 KK	15,740,000		17,250,000		18,750,000		18,750,000	
			Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota	Terlaksananya penanganan korban bencana		1 Tahun	50,090,500	30 Orang	42,278,000	30 Orang	92,030,000		93,547,000		95,047,000		95,047,000	
			Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota	Terlaksananya penerimaan logistik dan peralatan serta penyediaan logistik di daerah		2 Paket logistik	76,961,500	30 Orang	15,419,000	2 Paket Logistik	72,145,800		75,162,800		78,162,300		78,162,300	
			Aktivasi Sistem komando Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando		1 Laporan	6,987,000	1 Laporan	11,741,000	1 Dokumen	13,380,300		14,897,300		16,398,000		16,398,000	
			Persentase Penanganan pasca bencana		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Penataan Sistem dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah bantuan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana		-	-		53,113,000		-	-	-	-	-	-	-	
			Pengelolaan dan Pemanfaatan sistem informasi kebencanaan	Pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan		-	-	2 Orang	53,113,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
							16,646,569,300		4,626,232,909		4,113,044,573		4,218,656,841		4,506,200,629		4,506,200,629	

C. REALISASI KEUANGAN

Adapun Realisasi Tahun 2022 sebesar Rp.16.603.685.388,- (Enam belas milyar enam ratus tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh delapan Rupiah) termasuk belanja gaji pegawai (Realisasi 99,53%). untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL
REALISASI ANGGARAN PERKEGIATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase capaian kinerja		2,480,776,300	2,451,918,530	99.53%
	A. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun		20,160,000	20,160,000	99.72%
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersedia	2 dokumen	3,599,000	3,599,000	100.00%
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang tersedia	1 dokumen	2,071,000	2,071,000	100%
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA SKPD yang tersedia	1 dokumen	2,071,000	2,071,000	98.02%
	4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang tersedia	1 dokumen	2,071,000	2,071,000	100%
	5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen perubahan DPA SKPD yang tersedia	1 dokumen	2,071,000	2,071,000	100.00%
	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 dokumen	3,900,000	3,900,000	100%
	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	4 dokumen	4,377,000	4,377,000	100.00%
	B. Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah		1,703,898,000	1,681,042,282	99.55%
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	1 laporan	1,693,998,000	1,671,142,282	98.65%

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

	2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 dokumen	7,200,000	7,200,000	100%
	3 Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	1 dokumen	2,700,000	2,700,000	100.00%
	C. Pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah			3,000,000	2,970,000	99.00%
	1. Penatausahaan barang milik daerah pada skpd	Pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah pada skpd	4 laporan	3,000,000	2,970,000	99.00%
	D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah		18,000,000	18,000,000	100%
	1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang dilaksanakan	4 orang	18,000,000	18,000,000	100%
	E. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah		220,314,000	220,000,361	131.70%
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	8 komponen	5,478,000	5,476,000	100%
	2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	22 buah	6,800,000	6,790,000	100%
	2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	7 layanan	6,350,000	6,050,000	95.28%
	3 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah SKPD yang diselenggarakan	350 kali	201,686,000	201,684,361	100.00%
	E. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah		85,930,500	81,390,500	74.96%
	1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan	4 unit	52,640,500	52,640,500	74.96%

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

	2. Pengadaan aset tetap lainnya	Jumlah aset tetap yang tersedia	26 buah	33,290,000	28,750,000	86.36%
	F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah		195,796,800	194,909,620	99.54%
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia	1 tahun	2,800,000	2,800,000	100.00%
	2. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 tahun	87,631,400	87,219,420	99.53%
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 tahun	105,365,400	104,890,200	99.55%
	G. Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah		233,677,000	233,445,767	99.93%
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 unit	40,000,000	39,990,300	99.98%
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	23 unit	131,370,000	131,188,467	99.86%
	3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	14 unit	30,507,000	30,467,000	99.87%
	4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	1 unit	31,800,000	31,800,000	100%
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase desa / kelurahan yang memperoleh layanan penanggulangan bencana		14,165,793,000	14,151,766,858	84.92%
	A. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		42,294,000	42,294,000	100%

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

	1 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara yang mendapat sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi pada daerah rawan bencana	2 kecamatan	42,294,000	42,294,000	100%
	B. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan dan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana		13,824,690,500	13,816,874,189	74.61%
	1 Pengelolaan resiko bencana kabupaten/kota	Jumlah Pemangkasan / penebangan / pembersihan pohon yang berpotensi menimbulkan dampak bencana pohon tumbang dalam dan luar wilayah kota	50 pohon	112,901,000	112,901,000	100.00%
	2 Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitas pencegahan dan kesiapsiagaan	1 desa	50,182,000	50,182,000	100.00%
	3 Penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Penanganan Pascabencana yang terpenuhi	1 tahun	13,605,075,000	13,598,112,889	99.95%
	4 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Tim Reaksi Cepat (TRC) yang ditingkatkan kapasitasnya	20 orang	56,532,500	55,678,300	98.49%
	C. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara yang mendapatkan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		298,808,500	292,598,669	97.76%
	1 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah penanganan darurat bencana yang dilaksanakan	40 KK	164,769,500	162,903,959	98.87%
	2 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah penanganan korban bencana yang dievakuasi	527 orang	50,090,500	47,292,750	94.41%
	3 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah logistik penyelamatan dan evakuasi yang disediakan	2 paket logistik	76,961,500	75,424,960	100%
	4 Aktifasi sistem komando penanganan darurat bencana	Pelaksanaan aktifasi sistem komando penanganan darurat bencana	15 orang	6,987,000	6,977,000	100%
Jumlah				16,646,569,300	16,603,685,388	99.53%

Berdasarkan Realisasi Program dan Kegiatan tahun 2022 dan dibandingkan dengan Perjanjian dan Penetapan Kinerja tahun 2022 , maka Capaian Kinerja Badan Peanggulangan Bencana Daerah tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / kota

1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	3.599.000,-	3.599.000,-	0
Output	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen	
Outcome	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	100%	

Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	2.071.000,-	2.071.000,-	0
Output	Jumlah dokumen RKA SKPD yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	
Outcome	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan	100%	100 %	

	evaluasi kinerja perangkat daerah			
--	-----------------------------------	--	--	--

Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	2.071.000,-	2.071.000,-	0
Output	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD yang tersedia	1 dokumen	1 dokumen	
Outcome	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100 %	

Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	2.071.000,-	2.071.000,-	0
Output	Jumlah dokumen DPA SKPD yang tersedia	1 dokumen	1 dokumen	
Outcome	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100 %	

Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	2.071.000,-1	2.071.000,-	0
Output	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD yang tersedia	Dokumen	1 Dokumen	
Outcome	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan	100%	100 %	

	evaluasi kinerja perangkat daerah			
--	--------------------------------------	--	--	--

Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	3.900.000,-	3.900.000,-	0
Output	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 dokumen	12 dokumen	
Outcome	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100 %	

Evaluasi kinerja perangkat daerah

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	4.377.000,-	4.377.200,-	0
Output	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	4 dokumen	4 dokumen	
Outcome	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100 %	

2. Administrasi keuangan

Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	1.693.998.000,-	1.671.142.282,-	0

Output	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	1 laporan	1 laporan	
Outcome	Persentase pengembangan sistem pelaporan keuangan	100%	98,65 %	

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	7.200.000,-1	7.200.000,-	0
Output	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 dokumen	1 dokumen	
Outcome	Persentase pengembangan sistem pelaporan keuangan	100%	100 %	

Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	2.700.000,-1	2.700.000,-	0
Output	Jumlah Peserta yang Dikirim	1 dokumen	1 dokumen	
Outcome	Persentase pengembangan sistem pelaporan keuangan	100%	100%	

3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

Penata usahaan barang milik daerah pada SKPD

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	3.000.000,-	2.970.000,-	0
Output	Jumlah Laporan penatausahaan	4 laporan	4 laporan	

	barang milik daerah pada SKPD			
Outcome	Persentase Administrasi barang milik daerah yang tersedia	100 %	99 %	

4. Administrasi kepegawaian perangkat daerah

Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	18.000.000,-	18.000.000,-	0
Output	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang dilaksanakan	4 orang	4 orang	
Outcome	Persentase peningkatan kompetensi teknis pegawai	100 %	100 %	

5. Administrasi umum perangkat daerah

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	5.478.000,-	5.476.000,-	0
Output	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	8 komponen	8 komponen	
Outcome	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang dapat dipenuhi	100 %	99,96 %	

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	6.800.000,-	6.790.000,-	0
Output	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	22 buah	22 buah	
Outcome	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang dapat dipenuhi	100 %	99,85 %	

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	6.350.000,-	6.050.000,-	0
Output	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan yang disediakan	7 layanan	7 layanan	
Outcome	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang dapat dipenuhi	100 %	95,28%	

Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	201.686.000,-	201.684.361,-	0
Output	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah SKPD yang diselenggarakan	350 kali	350 kali	
Outcome	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat	100 %	100 %	

	daerah yang dapat dipenuhi			
--	----------------------------	--	--	--

6. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Pengadaan peralatan dan mesin lainnya				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	52.640.500,-	52.640.500,-	0
Output	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	4 unit	4 unit	
Outcome	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100 %	100 %	

Pengadaan aset tetap lainnya				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	33.290.000,-	28.750.000,-	0
Output	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	26 buah	26 buah	
Outcome	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100 %	86,36 %	

7. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Penyedia jasa surat menyurat				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	2.800.000,-	2.800.000,-	0
Output	Jumlah laporan penyedia jasa surat menyurat	1 tahun	1 tahun	
Outcome	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan	100 %	100 %	

	pemerintah daerah yang tersedia			
--	---------------------------------	--	--	--

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	87.631.400,-	87.219.420,-	0
Output	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 tahun	1 tahun	
Outcome	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100 %	99,53%	

Penyediaan jasa pelayanan umum kantor				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	105.365.400,-	104.890.200,-	0
Output	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 tahun	1 tahun	
Outcome	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100 %	99,55 %	

8. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan

Input	Dana	40.000.000,-	39.990.300,-	0
Output	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 unit	1 unit	
Outcome	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100 %	99,98%	

Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	131.370.000,-	131.188.467,-	0
Output	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	23 unit	23 unit	
Outcome	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100 %	99,86 %	

Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	30.507.000,-	30.467.000	0
Output	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	14 Unit	14 unit	
Outcome	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	99,87 %	

	penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia			
--	--	--	--	--

Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	31.800.000,-	31.800.000,-	0
Output	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit	1 unit	
Outcome	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100%	100 %	

B. Program penanggulangan bencana
1. Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten / kota
Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten / kota (per jenis bencana)

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	42.294.000,-	42.294.000,-	0
Output	Jumlah warga negara yang mendapat sosialisasi, informasi dan edukasi pada daerah rawan bencana	2 kecamatan	2 kecamatan	
Outcome	Persentase penanganan korban darurat bencana	100 %	100 %	

2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
Pengelolaan risiko bencana kabupaten / kota

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	112.901.000,-	112.901.000,-	0

Output	Jumlah pemangkasan pohon yang berpotensi menimbulkan dampak bencana pohon tumbang dalam dan luar wilayah kota	50 pohon	50 pohon	
Outcome	Persentase penanganan korban darurat bencana	100 %	100 %	
Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	50.182.000,-	50.182.000,-	0
Output	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	1 desa	1 desa	
Outcome	Persentase penanganan korban darurat bencana	100 %	100 %	

Penanganan pasca bencana kabupaten/kota				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	13.605.075.000,-	13.598.112.889,-	0
Output	Jumlah penanganan pasca/bencana yang terpenuhi	1 tahun	1 tahun	
Outcome	Persentase penanganan korban darurat bencana	100 %	99,95 %	

Pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (TRC) bencana kabupaten / kota				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	56.532.500,-	55.678.300,-	0
Output	Jumlah tim reaksi cepat yang ditingkatkan kapasitasnya	20 orang	20 orang	
Outcome	Persentase penanganan korban darurat bencana	100%	98,49%	

3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Respon cepat penanganan darurat bencana kabupaten / kota				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	164.769.500,-	162.903.959,-	0
Output	Jumlah penanganan darurat bencana yang dilaksanakan	40KK	40 KK	
Outcome	Persentase penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	98,87 %	

Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten / kota				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	50.090.500,-	47.292.750,-	0
Output	Jumlah penanganan korban bencana yang dievakuasi	527 orang	527 Orang	
Outcome	Persentase penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	94,41%	

Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten / kota

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	76.961.500,-	75.424.960,-	0
Output	Jumlah logistik penyelamatan dan evakuasi yang disediakan	2 paket logistik	2 paket logistik	
Outcome	Persentase penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	98%	

Aktifasi sistem komando penanganan darurat bencana

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	6.987.000,-	6.977.000,-	0
Output	Jumlah laporan pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	15 orang	15 orang	
Outcome	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	99,86%	

BAB IV

PENUTUP

Sebagai lembaga yang baru berdiri selama kurang lebih 9 (Sembilan) tahun, eksistensi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mengemban tugas sebagai pelaksana penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana disadari belum memberikan arti yang signifikan, dibanding dengan beban dan tanggung jawab dalam mengantisipasi, mengurangi, dan melaksanakan penanggulangan bencana daerah.

Hal ini antara lain karena keterbatasan anggaran dalam membiayai berbagai permasalahan mulai prabencana, tanggap darurat, hingga pasca bencana, dan faktor SDM yang ada, baik pada tingkat kelembagaan daerah maupun masyarakat.

Selain itu, urusan penanganan bencana sebelum terbentuknya BPBD di masa lalu, sepenuhnya ditangani dan atau dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Pusat, sehingga pemerintah daerah terutama institusi yang ada belum cukup berpengalaman dalam memahami dan mengejawantahkan secara optimal pelaksanaan urusan di Bidang Penanggulangan Bencana.

Oleh karena itu, penanggulangan bencana pada tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar, seyogyanya bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah daerah semata, namun juga dituntut adanya kesadaran dan peran serta dari segenap stakeholders yang ada dalam rangka mengoptimalkan pencapaian kinerja di bidang penanggulangan bencana. Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat menjadi salah satu perwujudan dari akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.

L
A
M
P
I
R
A
N



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 - 21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Drs AHMAD ANSAR, M Si

Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. MUH. BASLI ALI

Jabatan : Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


H. MUH. BASLI ALI

Benteng, 06 Februari 2023

Pihak Kesatu,



Drs. AHMAD ANSAR, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kebencanaan	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi	1 Tahun
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1 Tahun
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1 Tahun

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Rp. 2.778.184.459,00	
2. Program Penanggulangan Bencana	Rp.1.848.003.450,00	

Bupati Kepulauan Selayar,


H. MUH. BASLI ALI

Benteng, 23 Januari 2023
Kepala Pelaksana BPBD,


Drs. ARMAD ANSAR, M. Si.

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KEPALA PELAKSANA BADAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KELUARAN	HASIL	KET
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah			
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang terpenuhi	22 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	
	- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	- Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)		- Tersedianya dokumen RENJA	
		- Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023	2 Dokumen	- Tersedianya dokumen perjanjian kinerja tahun anggaran 2023	
		- Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)	1 Dokumen	- Tersedianya dokumen RKA	
	- Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD			- Tersedianya dokumen RKAP	
	- Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	- Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP)	1 Dokumen		
	- Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	- Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	1 Dokumen	- Tersedianya dokumen DPA	
	- Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA SKPD	- Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPAP)	1 Dokumen	- Tersedianya dokumen DPAP	
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RPA) SKPD		- Tersedianya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan sebanyak 12 (Duabelas) Laporan	
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Penyusunan LAKIP	1 Laporan	- Tersedianya dokumen LAKIP	

		- Penyusunan LKPJ - Penyusunan LPPD - Penyusunan SPM	4 Dokumen	- Tersedianya dokumen LKPJ - Tersedianya dokumen LPPD - Tersedianya dokumen SPM
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Keuangan yang dapat dipenuhi	1 Tahun	- Tersedianya dokumen SPM Persentase Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan - Tersedianya gaji dan tunjangan bagi ASN selama 1 (satu) tahun - Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun sebanyak 1 (satu) Laporan
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 (satu) Dokumen	
	- Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	- Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan BPK dan Inspektorat	1 (satu) Laporan	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	- Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah yang disediakan	1 Tahun	- Tersedianya dokumen dan bahan tanggapan pemeriksaan Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah - Tersedianya laporan aset SKPD
	- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Penyediaan laporan aset SKPD	2 Laporan	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Jumlah Pelayanan Jasa Administrasi yang dapat dipenuhi	1 Tahun	- Tersedianya Pelayanan Jasa Administrasi yang dapat dipenuhi
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	- Tersedianya komponen alat listrik yang terpasang
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Penyediaan kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8 Layanan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan & Layanan
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Pelaksanaan Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam & Luar Daerah	1 Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam & Luar Daerah
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang tersedia	1 Tahun	- Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah
	- Pengadaan Peralatan dan Measn Lainnya	- Penyediaan Peralatan dan Measn Lainnya	4 Unit Peralatan dan measn lainnya yang dapat disediakan	- Tersedianya Peralatan dan measn lainnya

	- Pengadaan Mebel	- Pelaksanaan penyediaan Meubeler	Penyediaan Meubeler Kurat Rapat	- Tersedianya Meubeler kurat rapat sebanyak 20 buah
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan jasa surat menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia - Penyediaan jasa surat menyurat - Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun - Laporan - Laporan - Laporan	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Tersedianya dokumen surat menyurat - Tersedianya jasa komunikasi, air & listrik - Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tersedia - Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	1 Tahun - 1 (satu) Unit Mobil Jabatan yang dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah - Terlaksananya pemeliharaan Mobil Jabatan 1 Unit
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	1 (satu) Laporan	- Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional 20 Unit
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pelaksanaan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 (satu) Laporan 1 (satu) Laporan	- Terlaksananya pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya - Terlaksananya pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor
B.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KORBAN DARURAT BENCANA	1 Tahun	Penyediaan Penanganan Korban Darurat Bencana
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Jasa Informasi Rawan Bencana		

	- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota - Penyusunan kajian resiko bencana Kabupaten/Kota	- Aplikasi Informasi pelaporan dan Pengaduan Bencana daerah - dokumen kajian resiko bencana	Aplikasi Informasi pelaporan dan Pengaduan di google playstore Jumlah Dokumen Kajian resiko bencana	tersedianya aplikasi informasi yang dapat diunduh di Google Playstore yang dapat diakses seluruh masyarakat di Kab. Kepulauan Selayar Tersedianya dokumen kajian resiko bencana	
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana - Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Penanganan Wilayah Manajemen Bencana - Pengadaan peralatan mesin - Pengadaan baju dinas lapangan	1 Tahun Jumlah peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan yang telah tersedia Jumlah pakaian dinas lapangan yang telah tersedia	Cakupan Penanganan Wilayah Manajemen Bencana - tersedianya peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana - tersedianya pakaian dinas lapangan	
	- Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	- Penebangan / pemangkasan pohon	Jumlah pohon yang ditebang/di pangkas yang berpotensi menimbulkan dampak bencana pohon tumbang	Tertanganinya pohon yang berpotensi menimbulkan bencana / pohon tumbang	
	- Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	- Pemasangan rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul, dan rambu informasi bencana pada daerah rawan bencana - Pembentukan Personil Tim Reaksi Cepat yang terlatih	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitas pencegahan dan kesiapsiagaan 1 (satu) Laporan Personil Tim Reaksi Cepat yang terlatih	Terpasangnya rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul, dan rambu informasi bencana pada daerah rawan bencana Tersedianya SDM Tim Reaksi Cepat yang terlatih sebanyak 15 Orang	
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1 Tahun	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	

	- Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	- Pemberian bantuan stimulan bagi korban bencana	1 (satu) Laporan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tersedianya Pemberian stimulan, logistik dan kaji cepat bagi korban bencana sebanyak 40 KK
	- Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	- Penanganan Korban Bencana	1 (satu) Laporan dalam penanganan Korban Bencana	Terlaksananya Penanganan Korban Bencana
	- Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	- Penyaluran Bantuan Logistik dan peralatan dari provinsi dan BNPB terhadap korban bencana	1 (satu) Laporan Ketersediaan Logistik dan Peralatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, Kab./Kota	Terlaksananya Penerimaan Logistik dan Peralatan serta Penyediaan Logistik di Daerah
	- Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	- Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando	1 (satu) Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando	Terlaksananya Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Bantuan Logistik Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1 Tahun	Persentase Penanganan Korban Darurat Bencana
	- Peningkatan dan Pemanfaatan sistem Informasi Kebencanaan	- Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Persentase Pengumpulan Data kebencanaan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
	- Penanganan pascabencana kabupaten/kota	- Peninjauan dan assesment	Jumlah rumah yang ditinjau dan diassesment	- Data nilai kerusakan dan kebutuhan atap seng
		- Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat pascabencana	Jumlah rumah yang mendapat bantuan perbaikan atap seng	- Data rumah yang mendapat bantuan perbaikan atap seng

		- Monitoring dan evaluasi	Jumlah rumah yang telah memanfaatkan dan belum memanfaatkan bantuan perbaikan rumah	- Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi	
		- Koordinasi dan konsultasi penanganan pascabencana	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi penanganan pascabencana	- Tersedianya laporan hasil koordinasi dan konsultasi	
		- Pendampingan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi	Jumlah dokumen pendampingan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi	- Terlaksananya pendampingan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi	
		- Retensi Tanggul Pengaman Pantai/sungai Desa Buki Kec. Buki	Panjang Tanggul Pengaman Pantai/sungai Desa Buki Kec. Buki	- Terlindunginya rumah penduduk dan aset dari kerusakan akibat gelombang pasang dan banjir	

Bonteng, 06 Februari 2023

KEPALA PELAKSANA BPBD,



Drs. AHMAD ANSAR, M. Si
NIP. 19730406 199203 1 002

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PROGRAM : **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AUGUST	SEPT	OKT	NOV	DES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1.	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	1. Menyusun rencana kegiatan Badan Penanggulangan Bencana daerah berdasarkan data, program dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja 2. Memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar melaksanakan tugas berjalan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar melaksanakan tugas sesuai dengan yang diharapkan 4. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas dan permasalahannya 5. Mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi, sumber daya serta kerjasamanya 6. Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja 7. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dan peningkatan karier 8. Melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp 2.704.409.459																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PROGRAM : PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT		
				JAN	FEB	MAR	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES			
1.	PELAKSANAAN PENANGANAN KORBAN DARURAT BENCANA	1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan Bencana, terhadap darurat rehabilitasi, dan rekonstruksi 2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan Bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana 4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan Bencana 5. Mengkordinasi dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, rangkuan upaya untuk mengurangi resiko bencana (mitigasi) dan kesiapsiagaan kepada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat 6. Mengkordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dukungan logistik 7. Mengkordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana yang meliputi penanganan pengungsi, rehabilitasi, rekontruksi dan rekonsiasi 8. Melaporkan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada Bupati setiap Bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat Bencana	Rp 1.848.048.450															



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **PATTA BAU, S Sos , M Si**
Jabatan : **Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. AHMAD ANSAR, M Si**
Jabatan : **Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 06 Februari 2023

Pihak Kedua,

Drs. AHMAD ANSAR, M.Si

Pihak Pertama,

PATTA BAU, S.Sos., M.Si.

**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
SEKRETARIS BADAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KELUARAN	HASIL
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah		
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang terpenuhi		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
	- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	- Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)		- Tersedianya dokumen RENJA
		- Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023	2 Dokumen	- Tersedianya dokumen perjanjian kinerja tahun anggaran 2023
	- Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	- Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)	1 Dokumen	- Tersedianya dokumen RKA
	- Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	- Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP)	1 Dokumen	- Tersedianya dokumen RKAP
	- Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	- Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	1 Dokumen	- Tersedianya dokumen DPA
	- Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA SKPD	- Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPAP)	1 Dokumen	- Tersedianya dokumen DPAP
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (R2K) SKPD	1 Laporan	- Tersedianya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan sebanyak 12 (Duabelas) Laporan

	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Penyusunan LAKIP		- Tersedianya dokumen LAKIP
		- Penyusunan LKPI		- Tersedianya dokumen LKPI
		- Penyusunan LPPD		- Tersedianya dokumen LPPD
		- Penyusunan SPM		- Tersedianya dokumen SPM
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang dapat dipenuhi		Pemertase Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 (satu) Dokumen	- Tersedianya gaji dan tunjangan bagi ASN selama 1 (satu) tahun
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 (satu) Laporan	- Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun sebanyak 1 (satu) Laporan
	- Pengelolaan dan Penyusunan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	- Pengelolaan dan Penyusunan Bahan Tanggapan Pemeriksaan BPK dan Inspektorat	1 (satu) Dokumen	- Tersedianya dokumen dan bahan tanggapan pemeriksaan
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah yang disediakan		Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah
	- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Penyediaan laporan aset SKPD	12 Laporan	- Tersedianya laporan aset SKPD
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Jasa Administrasi yang dapat dipenuhi		Tersedianya Pelayanan Jasa Administrasi yang dapat dipenuhi
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	- Tersedianya komponen alat listrik yang terpasang
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Penyediaan barang cetak dan penggandaan	1 Paket	- Tersedianya barang cetak dan penggandaan
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Penyediaan kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8 Layanan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Pelaksanaan Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam & Luar Daerah	1 Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam & Luar Daerah
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang tersedia - Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pelaksanaan penyediaan Meubeler	4 Unit Peralatan dan mesin lainnya yang dapat disediakan Penyediaan Meubeler Kursi Rapat	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah - Tersedianya Peralatan dan mesin lainnya 4 Unit - Tersedianya Meubeler kursi rapat sebanyak 20 buah
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan jasa surat menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia - Penyediaan jasa surat menyurat - Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Dokumen 1 Laporan layanan jasa komunikasi, air & listrik	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Tersedianya dokumen surat menyurat - Tersedianya jasa komunikasi, air & listrik - Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor 1 Laporan
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tersedia	1 Laporan	Terpeenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	1 (satu) Unit Mobil Jabatan yang dipelihara	- Terlaksananya pemeliharaan Mobil Jabatan 1 Unit
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	1 (satu) Laporan	- Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional 20 Unit
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 (satu) Laporan	- Terlaksananya pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Pelaksanaan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 (satu) Laporan	- Terlaksananya pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor 1 Unit

KEPALA PELAKSANA BPBD,

Drs. AHMAD ANSAR, M. Si

NIP. 19730406 199203 1 002

Batang, 4 Januari 2022

SEKRETARIS BADAN,

PATTA YAU, S.Sos., M.Si

NIP. 19760611 200502 1 010

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

[illegible]

[illegible]

No	Uraian Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Waktu	Anggaran	Realisasi
4	Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA - SKPD	1. Pembentukan tim Penyusun Dokumen RKA Perubahan 2. Melakukan koordinasi PPAS 3. Meminta dan mengumpulkan usulan RKA perubahan 4. Menyusun RKA perubahan 5. Melakukan asistensi RKA perubahan 6. Melakukan revisi hasil RKA perubahan 7. Melakukan revidi RKA perubahan 8. Melakukan revisi RKA perubahan hasil revidi 9. Menyampaikan RKA perubahan ke tim anggaran/tim asistensi 10. Dokumen RKA perubahan	Rp 2.936.000		
5	Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan dokumen DPA - SKPD	1. Pembentukan tim Penyusun Dokumen DPA 2. Menghadiri rapat dengan tim anggaran DPRD 3. Melakukan koordinasi PPAS 4. Meminta dan mengumpulkan usulan DFA 5. Menyusun DPA 6. Melakukan asistensi DPA 7. Melakukan revidi DPA 8. Menyampaikan DPA ke tim anggaran/tim asistensi 9. Dokumen DPA	Rp 2.936.000		
6	Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan DPA - SKPD	1. Pembentukan tim Penyusun Dokumen DPA Perubahan 2. Melakukan koordinasi PPAS 3. Meminta dan mengumpulkan usulan DPA Perubahan 4. Menyusun DPA Perubahan 5. Melakukan asistensi DPA Perubahan 6. Melakukan revisi hasil DPA Perubahan 7. Melakukan revidi DPA Perubahan 8. Melakukan revisi DPA Perubahan hasil revidi	Rp 2.936.000		

	9 Menyampaikan DPA Perubahan ke tim anggaran/tim asistensi		
7	Penyusunan Laporan Realisasi Fiskal dan Keuangan (RFK) SKPD	Rp 3.750.000	
	10 Dokumen DPA Perubahan		
	1. Pembentukan tim Penyusun Laporan Realisasi Fiskal dan Keuangan (RFK) SKPD		
	2. Mengumpulkan dokumen terkait realisasi dan penyerapan anggaran SKPD		
	3. Menyusun laporan capaian kinerja SKPD		
	4. Menyampaikan dokumen capaian kinerja SKPD ke Bagian Pembangunan Setda, Bappedalitbangda dan BPKPD		
8	Pelaksanaan Penyusunan dokumen LAKIP	Rp 3.300.000	
	1. Pembentukan tim Penyusun Dokumen LAKIP		
	2. Memahami kebijakan yang berkaitan dengan LAKIP		
	3. Mengumpulkan data internal/eksternal		
	4. Membahas & mengklarifikasi data internal/eksternal yang terkumpul		
	5. Menyusun rekapitulasi anggaran		
	6. Melakukan pengukuran kinerja		
	7. Melakukan evaluasi kinerja		
	8. Melakukan Penyusunan LAKIP		
	9. Menyampaikan LAKIP yang telah disusun kepada pimpinan untuk ditandatangani atau disahkan kemudian disampaikan ke Bagian Orpeg Setda		
	10. Menyempurnakan Dokumen LAKIP berdasarkan saran dan rekomendasi dan disampaikan kembali ke Bagian Orpeg Setda		
	11. Dokumen LAKIP		
9	Pelaksanaan Penyusunan dokumen LKPJ		
	1. Pembentukan Tim Penyusun Dokumen LKPJ		
	2. Membuat format pengumpulan data dan informasi dari masing-masing bidang dan sekretariat		

[illegible]

		5. Membuat ST/SPD			
		6. Mengikuti Acara Sesuai Surat Tugas			
		7. Membuat Laporan			
		8. Melengkapi SPJ			
20	Penyediaan peralatan dan mesin lainnya	1. Membuat nota pesanan	Rp	64.656.000	
		2. Membuat berita acara penerimaan barang			
		3. Membuat berita acara pemeriksaan barang			
		4. Membuat kwitansi pembayaran			
21	Penyediaan Meubeler	1. Membuat nota pesanan	Rp	10.392.000	
		2. Membuat berita acara penerimaan barang			
		3. Membuat berita acara pemeriksaan barang			
		4. Membuat kwitansi pembayaran			
22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Menerima surat masuk	Rp	5.790.000	
		2. Mengagenda surat masuk			
		3. Memberikan lembar disposisi			
		4. Mengantar surat ke ruangan sekretaris untuk diparaf			
		5. Mengantar surat ke ruangan Kalaksa untuk disposisi			
		6. Mendistribusikan surat yang sudah di disposisi			
		7. Mengagenda surat keluar			
		8. Memberi nomor surti keluar			
		9. Mengantar surat			
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Mengecek Daftar Tagihan bulanan	Rp	133.336.000	
		2. Mengajukan Tagihan Kepada Bendahara			
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Penyediaan ATK	Rp	187.754.000	
		2. Melaksanakan Urusan Surat Menyurat			
		3. Pembuatan SK PPTK			
		4. Pembuatan SK Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai			
		5. Pengusulan Tenaga Kontrak			
		6. Pengusulan PA, PPK ST/SPD, Bendahara Pengeluaran, Pengawas Barang			



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : REY RIVALDI ALFONS, ST.
Jabatan : Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. AHMAD ANSAR, M.Si
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 06 Februari 2023

Pihak Kedua,

Drs. AHMAD ANSAR, M.Si

Pihak Pertama,

REY RIVALDI ALFONS, ST.

**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

PROGRAM : PENANGGULANGAN BENCANA

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KELUARAN	HASIL	KET
1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	- Aplikasi Informasi pelaporan dan Pengaduan Bencana daerah	- Aplikasi Informasi pelaporan dan Pengaduan di google playstore	- tersedianya aplikasi informasi yang dapat diunduh di Google Playstore yang dapat diakses seluruh masyarakat di Kab. Kepulauan Selayar	
2	Penyusunan kajian resiko bencana Kabupaten/Kota	- dokumen kajian resiko bencana	- Jumlah Dokumen Kajian resiko bencana	- Tersedianya dokumen kajian resiko bencana	
3	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	- Pengadaan peralatan mesin - Pengadaan baju dinas lapangan	- Jumlah peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan yang telah tersedia - Jumlah pakaian dinas lapangan yang telah tersedia	- tersedianya peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana - tersedianya pakaian dinas lapangan	

		- Pengadaan rambu tidak bersuar (rambu jalur evakuasi, titik kumpul, dan papan informasi bencana)	- Jumlah rambu tidak bersuar (rambu jalur evakuasi, titik kumpul, dan papan informasi bencana) yang tersedia	- tersedianya rambu tidak bersuar (rambu jalur evakuasi, titik kumpul, dan papan informasi bencana)	
4	Pengelolaan resiko bencana Kabupaten/ Kota	Penebangan / pemangkasan pohon	Jumlah pohon yang ditebang/di pangkas yang berpotensi menimbulkan dampak bencana pohon tumbang	Tertanganinya pohon yang berpotensi menimbulkan bencana / pohon tumbang	
5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Pemasangan rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul, dan rambu informasi bencana pada daerah rawan bencana	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitas pencegahan dan kesiapsiagaan	Terpasangnya rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul, dan rambu informasi bencana pada daerah rawan bencana	

Mengetahui :
Kepala Pelaksana BPBD,

Drs. AHMAD ANSAR, M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19730406 199203 1 002

Benteng, 06 Februari 2023

Kabid. Pencegahan & Kesiapsiagaan,

Rey Rivaldi Alfons, S.T.
Pangkat : Penata Tk.I
Nip : 19870113 201101 1 009

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023

[illegible]

	- Pengadaan pakaian dinas lapangan	1. melakukan survey rekanan	
	- pengadaan rambu tidak bersuar (rambu jalur evakuasi, titik kumpul, dan papan informasi bencana)	2. melakukan pembelian pakaian dinas lapangan 1. melakukan survey rekanan 2. melakukan pembelian rambu tidak bersuar (rambu jalur evakuasi, titik kumpul, dan papan informasi bencana)	
4	Pengelolaan resiko bencana Kabupaten/kota - Penebangan /Pemangkasn Pohon	1. Pembentukan tim penebangan /Pemangkasn pohon 2. Rapat kerja tim terkait pelaksanaan penebangan /pemangkasn pohon 3. Merindaklanjuti surat permintaan penebangan /pemangkasn pohon 4. Pelaksanaan kegiatan penebangan /pemangkasn pohon 5. Pembuatan laporan kegiatan	Rp 155.320.000

5 Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan - Pemasangan rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul dan rambu informasi bencana pada daerah rawan bencana	1. Pembentukan tim pemasangan rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul, dan rambu papan informasi bencana 2. Rapat kerja tim terkait pemasangan rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul dan rambu informasi bencana 3. Koordinasi dengan pemerintah setempat (Camat/Lurah/Kepala Desa) 4. Pelaksanaan kegiatan pemasangan rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul dan rambu informasi bencana 5. Pembuatan laporan kegiatan Rp 47.800.000	
--	--	--

Mengetahui :
Kepala Pelaksana BPBD,

Drs. AHMAD ANSAR, M.SI.
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19730406 199203 1 002

Benteng, 06 Februari 2023
Kabid. Pencegahan & Kesiapsiagaan,


Rey Rivaldi Alfons, S.T.
Pangkat : Penata Tk.1
Nip : 19870113 201101 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 - 21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANDI BAHARUDDIN, SE**
Jabatan : Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. AHMAD ANSAR, M.Si**
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 06 Februari 2023

Pihak Kedua,

Drs. AHMAD ANSAR, M.Si

Pihak Pertama,

ANDI BAHARUDDIN, SE

PERJANJIAN KINERJA 2023
BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KELUARAN	HASIL	KET
A	PELAYANAN, PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	Persentase penanganan korban bencana			
1.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Pembentukan Personil Tim Reaksi Cepat yang terlatih	1 (satu) Laporan Personil Tim Reaksi Cepat yang terlatih	Tersedianya SDM Tim Reaksi Cepat yang terlatih sebanyak 15 Orang	
B	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	Persentase penanganan korban bencana			
1.	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Pemberian bantuan stimulan bagi korban bencana	1 (satu) Laporan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tersedianya pemberian stimulan, logistik dan kaji cepat bagi korban bencana	
2.	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Penanganan Korban Bencana	1 (satu) Laporan dalam penanganan Korban Bencana	Terlaksananya Penanganan Korban Bencana	
3.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Logistik dan peralatan yang diperoleh dari pemerintah Provinsi dan BNPB serta Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi oleh Daerah	1 (satu) Laporan Ketersediaan Logistik dan Peralatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab./Kota	Terlaksananya Penerimaan Logistik dan Peralatan serta Penyediaan Logistik di Daerah	
4.	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando	1 (satu) Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando	Terlaksananya Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando	
C	PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Pengumpulan Data Kebencanaan			
1.	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Pengumpulan Data Kejadian Bencana	1 (satu) Laporan Pelaksanaan Pengumpulan Data	Tersedianya Informasi Kebencanaan yang lengkap dan aktual kepada semua pihak	

Benteng, 06 Februari 2023

**KEPALA BIDANG KEDARURATAN
DAN LOGISTIK BPBD.**

KEPALA PELAKSANA BPBD.

Drs. AHMAD ANSAR, M.Si
NIP. 19730406 199203 1 002

ANDI-BACHARUDDIN, S.E
NIP. 19750418 200502 1 005

No	Kategori	Detail Kegiatan	Estimasi Biaya	Catatan
3.	Penanganan Korban Bencana	1. Membuat SK Tim Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 2. Menerima laporan kejadian bencana dari masyarakat maupun Pemerintah 3. Meneruskan laporan keatas / Pimpinan 4. Melakukan koordinasi 5. Menindaklanjuti kejadian/peristiwa bencana 6. Melakukan Pencarian, Pertolongan dan evakuasi Korban Bencana 7. Membuat laporan	Rp 42.278.000	
4.	Penyaluran Bantuan Logistik dan peralatan dari provinsi dan BNPB terhadap korban bencana	1. Membuat SK TIM Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 2. Membuat Proposal Permintaan Bantuan Peralatan dan Logistik 3. Mengantar Proposal 4. Menerima Rekomendasi Proposal Permintaan Bantuan Peralatan dan Logistik 5. Melakukan Koordinasi Penerimaan Bantuan 6. Menerima Bantuan Peralatan dan Logistik 7. Melakukan Penyediaan Logistik 8. Melakukan Inventarisasi Logistik 9. Membuat Laporan	Rp 15.419.000	



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini

Nama M SYUKRI SALLATU, ST
Jabatan Kabid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama Drs. AHMAD ANSAR, M Si
Jabatan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,

Drs. AHMAD ANSAR, M.Si

Benteng, 06 Februari 2023

Pihak Pertama,

M. SYUKRI SALLATU, ST.

PERJANJIAN KINERJA
BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2023

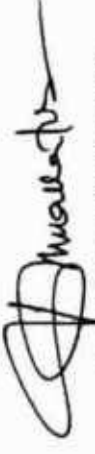
NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KELUARAN	HASIL
1.	Penanganan pascabencana kabupaten/kota	1. Peninjauan dan assesment	Jumlah rumah yang ditinjau dan diassesment	Data nilai kerusakan dan kebutuhan atap seng
		2. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat pascabencana	Jumlah rumah yang mendapat bantuan perbaikan atap seng	Data rumah yang mendapat bantuan perbaikan atap seng
		3. Monitoring dan evaluasi	Jumlah rumah yang telah memanfaatkan dan belum memanfaatkan bantuan perbaikan rumah	Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi
		4. Koordinasi dan konsultasi penanganan pascabencana	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi penanganan pascabencana	Tersedianya laporan hasil koordinasi dan konsultasi
		5. Retensi Tanggul Pengaman Pantai/sungai Desa Buki Kec. Buki	Panjang Tanggul Pengaman Pantai/sungai Desa Buki Kec. Buki	Terlindungnya rumah penduduk dan aset dari kerusakan akibat gelombang pasang dan banjir

Benteng, 06 Februari 2023

KEPALA PELAKSANA/BPBD,

KEPALA BIDANG REHABILITASI
DAN REKONSTRUKSI,

Drs. AHMAD ANSAR, M. SI.
NIP. 19730406 199203 1 002


M. SYUKRI SALLATU, ST.
NIP. 19720204 200604 1 017

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
---------	----------	--------------

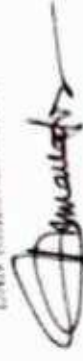
- : PENANGGULANGAN BENCANA
- : PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA
- : PENANGANAN PASCA BENCANA KABUPATEN / KOTA

[illegible]

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN (Rp.)	WAKTU PELAKSANAAN												BULAN
				JAN	FEB	MAR	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AUGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
4.	Koordinasi dan konsultasi penangan pascabencana	1. Pembuatan surat tugas. 2. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi. 3. Pembuatan laporan hasil pelaksanaan koordinasi dan konsultasi.														
5.	Retensi Tanggul Pengaman Pantai/sungai Desa Buki Kec. Buki	3. Pelaksanaan kegiatan Retensi Tanggul Pengaman 4. Pembuatan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.														

Beritung 06 Februari 2023

KEPALA BIDANG REHABILITASI
DAN REKONSTRUKSI,



M. SYUKRI SALLATU, ST.
NIP. 19720204 200604 1 017

KEPALA PELAKSANA BPRD,



Drs. AHMAD ANSAR, M. SI.
NIP. 19730406 199203 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALAMUDDIN, S.Pd
Jabatan : Kasubag Hukum Perencanaan dan Pelaporan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PATTA BAU, S.Sos., M.Si
Jabatan : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,

PATTA BAU, S.Sos., M.Si.

Benteng, 06 Februari 2023

Pihak Pertama,

ALAMUDDIN, S.Pd.

**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KASUBAG. HUKUM PERENCANAAN DAN PELAPORAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

POGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
KEGIATAN : PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KELUARAN	HASIL	KET
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	a. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Dokumen	Tersedianya dokumen RENJA	
		b. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023	Dokumen	Tersedianya dokumen perjanjian kinerja tahun anggaran 2023	
2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Dokumen	Tersedianya dokumen RKA	
3	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP)	Dokumen	Tersedianya dokumen RKAP	
4	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	a. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Dokumen	Tersedianya dokumen DPA	
5	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA SKPD	a. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPAP)	Dokumen	Tersedianya dokumen DPAP	
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a. Penyusunan LAKIP	Dokumen	Tersedianya dokumen LAKIP	
		b. Penyusunan LKPJ	Dokumen	Tersedianya dokumen LKPJ	

	c. Penyusunan LPPD		Dokumen	Tersedianya dokumen LPPD	
	d. Penyusunan SPM		Dokumen	Tersedianya dokumen SPM	

Benteng, 06 Januari 2023

KASUBBAG. HUKUM PERENCANAAN DAN
PELAPORAN,

ALAUDDIN. S. Pd.

NIP. 19650515 198602 1 018

SEKRETARIS BADAN,

PATTA BAU. S. Sos. M.Si.

NIP. 19760611 200502 1 010

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

KASUBAG. HUKUM PERENCANAAN DAN PELAPORAN

[illegible]

No	Uraian Kegiatan	Waktu	Biaya	Indikator Keberhasilan
8	Menganalisis data dan informasi Perjanjian Kinerja yang telah terkumpul			
9	Membuat Konsep Perjanjian Kinerja			
10	Mengoreksi Konsep Dokumen Perjanjian Kinerja			
11	Menyampaikan Dokumen Perjanjian Kinerja kepada Kaban untuk memintakan persetujuan			
12	Penandatangan dokumen Perjanjian Kinerja oleh Kaban kemudian diteruskan ke Kasubbag Hukum Perencanaan dan Pelaporan			
13	Membuat surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat, kemudian diserahkan ke staf untuk dikirimkan ke alamat yang dituju			
14	Mengantar surat, Menggandakan dan mengarsipkan Dokumen Perjanjian Kinerja			
1. Pembentukan tim Penyusun Dokumen RKA		Rp	2.936.000	
2. Menghadiri rapat dengan tim anggaran DPRD				
3. Melakukan koordinasi PPAS				
4. Meminta dan mengumpulkan usulan RKA				
5. Menyusun RKA				
6. Melakukan asistensi RKA				
7. Melakukan revisi hasil RKA				
8. Melakukan revisi RKA				
9. Melakukan revisi RKA hasil revisi				
10. Menyampaikan RKA ke tim anggaran/tim asistensi				
11. Dokumen RKA				
1. Pembentukan tim Penyusun Dokumen RKA Perubahan		Rp	2.936.000	
2. Melakukan koordinasi PPAS				
3. Meminta dan mengumpulkan usulan RKA perubahan				
4. Menyusun RKA perubahan				
5. Melakukan asistensi RKA perubahan				
6. Melakukan revisi hasil RKA perubahan				
7. Melakukan revisi RKA perubahan				

No	Kategori Kegiatan	Uraian Kegiatan	Berkas	Waktu	Anggaran
8.	Melakukan revisi RKA perubahan hasil revidi				
9.	Menyampaikan RKA perubahan ke tim anggaran/tim asistensi				
10.	Dokumen RKA perubahan				
1.	Pembentukan tim Penyusun Dokumen DPA		Rp	2.936.000	
2.	Menghadiri rapat dengan tim anggaran DPRD				
3.	Melakukan koordinasi PPAS				
4.	Meminta dan mengumpulkan usulan DPA				
5.	Menyusun DPA				
6.	Melakukan asistensi DPA				
7.	Melakukan revidi DPA				
8.	Menyampaikan DPA ke tim anggaran/tim asistensi				
9.	Dokumen DPA				
1.	Pembentukan tim Penyusun Dokumen DPA Perubahan		Rp	2.936.000	
2.	Melakukan koordinasi PPAS				
3.	Meminta dan mengumpulkan usulan DPA Perubahan				
4.	Menyusun DPA Perubahan				
5.	Melakukan asistensi DPA Perubahan				
6.	Melakukan revisi hasil DPA Perubahan				
7.	Melakukan revidi DPA Perubahan				
8.	Melakukan revisi DPA Perubahan hasil revidi				
9.	Menyampaikan DPA Perubahan ke tim anggaran/tim asistensi				
10.	Dokumen DPA Perubahan				
1.	Pembentukan tim Penyusun Dokumen LAKIP		Rp	3.388.000	
2.	Memahami kebijakan yang berkaitan dengan LAKIP				
3.	Mengumpulkan data internal/eksternal				
4.	Membahas & mengklarifikasi data internal/eksternal yang terkumpul				
5.	Menyusun rekapitulasi anggaran				
6.	Melakukan pengukuran kinerja				

[illegible]



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dra Hj. NURMIATI B
Jabatan : Kasubag. Umum dan Kepegawaian
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PATTA BAU, S.Sos., M.Si
Jabatan : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 06 Februari 2023

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,


PATTA BAU, S.Sos., M.Si.



Dra. Hj. NURMIATI B

**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

PROGRAM

PERUNJANG UMUMAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KELUARAN	HASIL	KET
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyediaan laporan aset SKPD	12 Laporan	Tersedianya laporan aset SKPD	
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	Tersedianya komponen alat listrik yang terpasang	
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8 Layanan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8 Layanan	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam & Luar Daerah	1 laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam & Luar Daerah	
6	Pengadaan Mebel	Pelaksanaan penyediaan Meubeler	Penyediaan Meubeler Kurai Rapat	Tersedianya Mebel Kurai Rapat	
7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit Peralatan dan mesin lainnya yang dapat disediakan	Tersedianya Peralatan dan mesin lainnya 3 Unit	
8	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	Tersedianya dokumen surat menyurat	
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan layanan jasa komunikasi, air & listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air & listrik	
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 (satu) Laporan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan	1 (satu) Unit Mobil Jabatan yang	Terlaksananya pemeliharaan Mobil	
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	1 (satu) Laporan	Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional 20 Unit	
13	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 (satu) Laporan	Terlaksananya pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya 1 Unit	
14	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pelaksanaan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 (satu) Laporan	Terlaksananya pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor 1 Unit	

Bonteng, 06 Februari 2023

SEKRETARIS,

PATTA BAU, S.S., M.Si

NIP. 19760611 200502 1 010

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN,

Dr. H. NURMIATI B.

NIP. 19680104 199603 2 003

[illegible]

[illegible]

10	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	PELAKSANAAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1	PENYEDIAAN ATK	1	MEMBUAT NOTA PESANAN BARANG	Rp 107.754.000
			2	PENYEDIAAN BELANJA JASA TERAKA PELAYANAN UMUM PHIL	2	MEMBUAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG	
			3	PENYEDIAAN BELANJA HURAN LAMIRAH KECELAKAAN KERJA	3	MEMBUAT KWITANSI	
					4	MEMBUAT USULAN SK PEREKUDA HABIAN LEPAS (PHL)	
11	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	PELAKSANAAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	1	PENYEDIAAN SIKU CADANG KENDARAAN DINAS JABATAN, BHM DAN SERVIS	5	MEMBUAT DAFTAR PEMBIAYARAN PENJAJARAN UPAH KERJA PERUBA HABIAN LEPAS	Rp 40.950.000
					6	MEPEKAP TAGIHAN IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN	
					1	MEMBUAT NOTA PESANAN BARANG	
					2	MEMBUAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG	
12	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	PELAKSANAAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL	1	PENYEDIAAN SIKU CADANG, BHM DAN SERVIS	3	MEMBUAT KWITANSI	Rp 191.190.000
					4	MEMBUAT REKAB TAGIHAN PAJAK KENDARAAN DINAS JABATAN	
					1	MEMBUAT NOTA PESANAN BARANG	
					2	MEMBUAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG	
					3	MEMBUAT KWITANSI	



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini

Nama **ANDI LAPANG, SP**
Jabatan **Kasubag Keuangan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama **PATTA BAU, S.Sos., M Si.**
Jabatan **Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 06 Februari 2023

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

PATTA BAU, S.Sos., M.Si.


ANDI LAPANG, SP.

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KASUBAG. KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 KEGIATAN : 1. PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
 2. ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

NO	SUB KIRGILATAN	INDIKATOR	KELUARAN	HASIL	KET
1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) SKPD	1 (satu) Laporan	Tersebutnya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan sebanyak 12 (Duabelas) Laporan	
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 (satu) Dokumen	Tersebutnya gaji dan tunjangan bagi ASN selama 1 (satu) tahun	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 (satu) Laporan	Tersebutnya Laporan Keuangan Akhir Tahun sebanyak 1 (satu) Laporan	
4	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan BPK dan Inspektorat	1 (satu) Dokumen	Tersebutnya dokumen dan bahan tanggapan pemeriksaan	

Benteng, 06 Februari 2023

KASUBBAG KEUANGAN

SEKRETARIS,

PATTAJAU, S.Sos., M.Si.
 NIP. 19760611 200502 1 010

ANDI LAPANG, S.P.
 NIP. 196811 02 200604 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama APRIANA USMAN, SE
Jabatan Analis Kebencanaan Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama REY RIVALDI ALFONS, ST
Jabatan Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 06 Februari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


REY RIVALDI ALFONS, ST.


APRIANA USMAN, SE.

**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

PROGRAM : PENANGGULANGAN BENCANA

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KELUARAN	HASIL	KET
1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	- Aplikasi Informasi pelaporan dan Pengaduan Bencana daerah	- Aplikasi Informasi pelaporan dan Pengaduan di google playstore	- tersedianya aplikasi informasi yang dapat diunduh di Google Playstore yang dapat diakses seluruh masyarakat di Kab Kepulauan Selayar	
2	Penyusunan kajian resiko bencana Kabupaten/Kota	- dokumen kajian resiko bencana	- Jumlah Dokumen Kajian resiko bencana	- Tersedianya dokumen kajian resiko bencana	
3	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	- Pengadaan peralatan mesin - Pengadaan baju dinas lapangan	- Jumlah peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan yang telah tersedia - Jumlah pakaian dinas lapangan yang telah tersedia	- tersedianya peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana - tersedianya pakaian dinas lapangan	

		- Pengadaan rambu tidak bersuar / rambu jalur evakuasi, titik kumpul, dan papan informasi bencana)	- Jumlah rambu tidak bersuar / rambu jalur evakuasi, titik kumpul, dan papan informasi bencana yang tersedia	- tersedianya rambu tidak bersuar / rambu jalur evakuasi, titik kumpul, dan papan informasi bencana)	
4	Pengelolaan resiko bencana Kabupaten/ Kota	Penebangan / pemangkasan pohon	Jumlah pohon yang ditebang/di pangkas yang berpotensi menimbulkan dampak bencana pohon tumbang	Tertinggalnya pohon yang berpotensi menimbulkan bencana / pohon tumbang	
5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Pemasangan rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul, dan rambu informasi bencana pada daerah rawan bencana	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitas pencegahan dan kesiapsiagaan	Terpasangnya rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul, dan rambu informasi bencana pada daerah rawan bencana	

Mengetahui :
Kabid. Pencegahan & Kesiapsiagaan,

Rev Rivaldi Alfons, S.T.
Pangkat : Penata Tk.I
Nip : 19870113 201101 1 009

Benteng, 06 Februari 2023

Analisis Kebencanaan Muda.

APRIANA USMAN, SE.
Nip : 19830430 201001 2 029

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023

[illegible]

- Pengadaan pakaian dinas lapangan - pengadaan rambu tidak bersuar (rambu jalur evakuasi, titik kumpul, dan papan informasi bencana)	1. melakukan survey rekanan 2. melakukan pembelian pakaian dinas lapangan 1. melakukan survey rekanan 2. melakukan pembelian rambu tidak bersuar (rambu jalur evakuasi, titik kumpul, dan papan informasi bencana)			
4 - Pengelolaan resiko bencana Kabupaten/kota - Penebangan /Pemangkasn Pohon	1. Pembentukan tim penebangan /Pemangkasn pohon 2. Rapat kerja tim terkait pelaksanaan penebangan /pemangkasn pohon 3. Menindaklanjuti surat permintaan penebangan /pemangkasn pohon 4. Pelaksanaan kegiatan penebangan /pemangkasn pohon 5. Pembuatan laporan kegiatan	Rp 155.320.000		

5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan - Pemasangan rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul dan rambu informasi bencana pada daerah rawan bencana	1. Pembentukan tim pemasangan rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul, dan rambu papan informasi bencana 2. Rapat kerja tim terkait pemasangan rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul dan rambu informasi bencana 3. Koordinasi dengan pemerintah setempat (Camat/Lurah/Kepala Desa) 4. Pelaksanaan kegiatan pemasangan rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul dan rambu informasi bencana 5. Pembuatan laporan kegiatan	Rp 47.800.000	
---	---	---	---------------	--

Mengetahui :
Kabid. Pencegahan & Kesiapsiagaan,

Rey Rivaldi Alfons, S.T.
Pangkat : Penata Tk.I
Nip : 19870113 201101 1 009

Benteng, 06 Februari 2023
Analis Kebencanaan Muda,

APRIANA VSMAN, SE.
Nip : 19830430 201001 2 029



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 - 21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini

Nama SYAHRUL, SE
Jabatan Analis Kebencanaan Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama REY RIVALDI ALFONS, ST
Jabatan Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

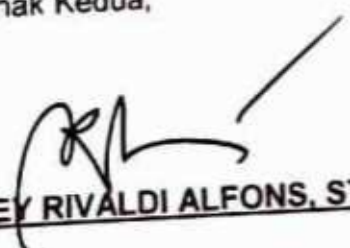
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

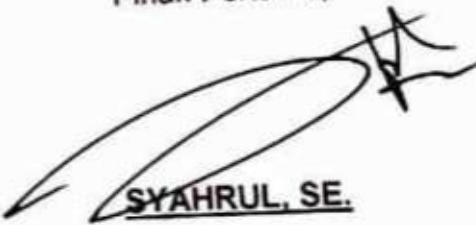
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 06 Februari 2023

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,


REY RIVALDI ALFONS, ST.


SYAHRUL, SE.

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

PROGRAM : PENANGGULANGAN BENCANA

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KELUARAN	HASIL	KET
1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	- Aplikasi Informasi pelaporan dan Pengaduan Bencana daerah	- Aplikasi Informasi pelaporan dan Pengaduan di google playstore	- tersedianya aplikasi informasi yang dapat diunduh di Google Playstore yang dapat diakses seluruh masyarakat di Kab. Kepulauan Selayar	
2	Penyusunan kajian resiko bencana Kabupaten/Kota	- dokumen kajian resiko bencana	- Jumlah Dokumen Kajian resiko bencana	- Tersedianya dokumen kajian resiko bencana	
3	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	- Pengadaan peralatan mesin - Pengadaan baju dinas lapangan	- Jumlah peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan yang telah tersedia - Jumlah pakaian dinas lapangan yang telah tersedia	- tersedianya peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana - tersedianya pakaian dinas lapangan	

		- Pengadaan rambu tidak bersuar (rambu jalur evakuasi, titik kumpul, dan papan informasi bencana)	- Jumlah rambu tidak bersuar (rambu jalur evakuasi, titik kumpul, dan papan informasi bencana) yang tersedia	- tersedianya rambu tidak bersuar / rambu jalur evakuasi, titik kumpul, dan papan informasi bencana)	
4	Pengelolaan resiko bencana Kabupaten / Kota	Penebangan / pemangkasan pohon	Jumlah pohon yang ditebang/di pangkas yang berpotensi menimbulkan dampak bencana pohon tumbang	Tertinggalnya pohon yang berpotensi menimbulkan bencana / pohon tumbang	
5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Pemasangan rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul, dan rambu informasi bencana pada daerah rawan bencana	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitas pencegahan dan kesiapsiagaan	Terpasangnya rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul, dan rambu informasi bencana pada daerah rawan bencana	

Benteng, 06 Februari 2023

Analisis Kebencanaan Muda


Syahrul, S.E.
Nip : 19740405 200701 1 037

Mengetahui :
Kabid. Pencegahan & Kesiapsiagaan,


Rey Rivaldi Alfons, S.T.

Pangkat : Penata Tk.I
Nip : 19870113 201101 1 009

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023

[illegible]

4	- Pengadaan pakaian dinas lapangan - pengadaan rambu tidak bersuar (rambu jalur evakuasi, titik kumpul, dan papan informasi bencana)	1. melakukan survey rekanan 2. melakukan pembelian pakaian dinas lapangan 1. melakukan survey rekanan 2. melakukan pembelian rambu tidak bersuar (rambu jalur evakuasi, titik kumpul, dan papan informasi bencana)	
	Pengelolaan resiko bencana Kabupaten/kota - Penebangan /Pemangkas Pohon	1. Pembentukan tim penebangan /Pemangkas pohon 2. Rapat kerja tim terkait pelaksanaan penebangan / pemangkas pohon 3. Meniadkanjuti surat permintaan penebangan / pemangkas pohon 4. Pelaksanaan kegiatan penebangan / pemangkas pohon 5. Pembuatan laporan kegiatan	Rp 155.320.000



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Hj. SITI MARYAM, S.Pd
Jabatan : Penata Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDI BAHARUDDIN, SE
Jabatan : Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

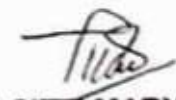
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Benteng, 06 Februari 2023

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,


ANDI BAHARUDDIN, SE.


Hj. SITI MARYAM, S.Pd

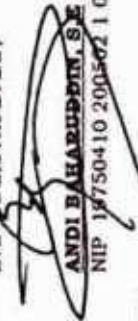
PERJANJIAN KINERJA 2023
BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KELUARAN	HASIL	KIT
A	PELAYANAN, PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	Persentasi penanganan korban bencana			
1.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Pembentukan Personil Tim Reaksi Cepat yang terlatih	1 (satu) Laporan Personil Tim Reaksi Cepat yang terlatih	Tersedianya 3DM Tim Reaksi Cepat yang terlatih sebanyak 15 Orang	
B	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	Persentasi penanganan korban bencana			
1.	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Pembelian bantuan stimulan bagi korban bencana	1 (satu) Laporan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tersedianya Pembelian stimulan, Logistik dan Haji cepat bagi korban bencana	
2.	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Penanganan Korban Bencana	1 (satu) Laporan dalam penanganan Korban Bencana	Terlaksananya Penanganan Korban Bencana	
3	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten /Kota	Jumlah Logistik dan peralatan yang diperoleh dari pemerintah Provinsi dan BNPB serta Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi oleh Daerah	1 (satu) Laporan Keterediaan Logistik dan Peralatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab./Kota	Terlaksananya Penerimaan Logistik dan Peralatan serta Penyediaan Logistik di Daerah	
4.	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando	1 (satu) Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando	Terlaksananya Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando	
C	PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA	Persentasi Pengumpulan Data Kebencanaan			
1	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Pengumpulan Data Kejadian Bencana	1 (satu) Laporan Pelaksanaan Pengumpulan Data	Tersedianya Informasi Kebencanaan yang lengkap dan akurat kepada semua pihak	

Bonteng, 06 Februari 2023

KEPALA BIDANG KEDARURATAN
DAN LOGISTIK BPBD,

PENATA PENANGGULANGAN BENCANA


ANDI BAHARUDIN, S.E.
NIP. 19750410 200502 1 005



H. SITI MARYAM, S. Pd.
NIP. 19681101 200701 2 017

TAHUN ANGGARAN 2023

[illegible]



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : SYAIFUL BAHRI, ST.

Jabatan : Analisis Kerusakan Fisik dan Bangunan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. SYUKRI SALLATU, ST

Jabatan : Kabid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 06 Februari 2023

Pihak Kedua,

M. SYUKRI SALLATU, ST.

Pihak Pertama,

SYAIFUL BAHRI, ST.

PERJANJIAN KINERJA
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KERUSAKAN FISIK DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KELUARAN	HASIL
1.	Penanganan pascabencana	1. Menyusun rekomendasi dibidang bencana	Jumlah rekomendasi dibidang bencana	Dokumen rekomendasi dibidang bencana
		2. Mengumpulkan data dibidang bencana	Jumlah data dibidang bencana	Dokumen data dibidang bencana
		3. Mengidentifikasi data objek kerja dibidang bencana	Jumlah hasil identifikasi data objek kerja dibidang bencana	Laporan data objek kerja dibidang bencana
		4. Menelaah data objek kerja dibidang bencana	Jumlah hasil telaah data objek kerja dibidang bencana	Laporan data objek kerja dibidang bencana
		5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya	Jumlah hasil pelaksanaan tugas kedinasan lain	Laporan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lain

Benteng, 06 Februari 2023

KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI,



M. SYUKRI SALLATU, S.T.
NIP. 19720204 200604 1 017



SYAIFUL BAHRI, S.T.
NIP. 19730125 200701 1 013

ANALIS KERUSAKAN FISIK DAN BANGUNAN

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN (Rp.)	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
				JAN	FEB	MAR	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1.	Menyusun rekomendasi dibidang bencana	1. Pembuatan SK tim kegiatan; 2. Pembuatan surat tugas; 3. Pelaksanaan penunjukan lokasi bencana; 4. Pembuatan dokumen rekomendasi dibidang bencana.														100%
2	Mengumpulkan data dibidang bencana	1. Pembuatan surat tugas; 2. Pelaksanaan pengumpulan data dibidang bencana; 3. Pembuatan dokumen hasil pelaksanaan pengumpulan data dibidang bencana.														
3.	Mengidentifikasi data objek kerja dibidang bencana	1. Pembuatan surat tugas; 2. Pelaksanaan: identifikasi data objek kerja dibidang bencana; 3. Pembuatan laporan hasil identifikasi data objek kerja dibidang bencana.														
4	Mencelah data objek kerja dibidang bencana	1. Pembuatan surat tugas; 2. Pelaksanaan penelaahan data objek kerja dibidang bencana; 3. Pembuatan laporan hasil pelaksanaan penelaahan data objek kerja dibidang bencana.														
5.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya	1. Pembuatan surat tugas; 2. Pelaksanaan tugas kedinasan lain. 3. Pembuatan laporan: hasil pelaksanaan tugas kedinasan lain.														

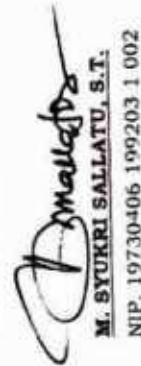
Benteng, 07 Februari 2023

ANALIS KERUSAKAN FISIK DAN BANGUNAN


SYAIFUL MAHRI, S.T.

NIP 19730125 200701 1 013

KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI.


M. SYUKRI SALLATU, S.T.
NIP. 19730406 199203 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RANI ENDANG ASTUTI, S Sos
Jabatan : Analis Mitigasi Bencana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : REY RIVALDI ALFONS, ST.
Jabatan : Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

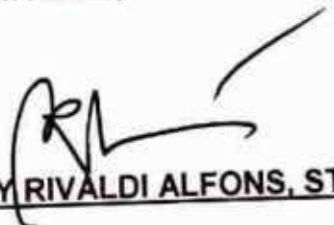
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 06 Februari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


REY RIVALDI ALFONS, ST.


RANI ENDANG ASTUTI, S. Sos.

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

PROGRAM : PENANGGULANGAN BENCANA

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KELUARAN	HASIL	KET
1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	- Aplikasi Informasi pelaporan dan Pengaduan Bencana daerah	- Aplikasi Informasi pelaporan dan Pengaduan di google playstore	- tersedianya aplikasi informasi yang dapat diunduh di Google Playstore yang dapat diakses seluruh masyarakat di Kab. Kepulauan Selayar	
2	Penyusunan kajian resiko bencana Kabupaten/Kota	- dokumen kajian resiko bencana	- Jumlah Dokumen Kajian resiko bencana	- Tersedianya dokumen Kajian resiko bencana	
3	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	- Pengadaan peralatan mesin - Pengadaan baju dinas lapangan	- Jumlah peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan yang telah tersedia - Jumlah pakaian dinas lapangan yang telah tersedia	- tersedianya peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana - tersedianya pakaian dinas lapangan	

		- Pengadaan rambu tidak bersuar (rambu jalur evakuasi, titik kumpul, dan papan informasi bencana)	- Jumlah rambu tidak bersuar (rambu jalur evakuasi, titik kumpul, dan papan informasi bencana) yang tersedia	- tersedianya rambu tidak bersuar (rambu jalur evakuasi, titik kumpul, dan papan informasi bencana)	
4	Pengelolaan resiko bencana Kabupaten./ Kota	Penebangan / pemangkasan pohon	Jumlah pohon yang ditebang/di pangkas yang berpotensi menimbulkan bencana pohon tumbang	Tertanganinya pohon yang berpotensi menimbulkan bencana / pohon tumbang	
5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Pemasangan rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul, dan rambu informasi bencana pada daerah rawan bencana	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitas pencegahan dan kesiapsiagaan	Terpasangnya rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul, dan rambu informasi bencana pada daerah rawan bencana	

Mengetahui :
Kabid. Pencegahan & Kesiapsiagaan,


Rey Rivaldi Alfons, S.T.
Pangkat : Penata Tk.I
Nip : 19870113 201101 1 009

Benteng, 06 Februari 2023

Analisis Mitigasi Bencana,



RANI ENDANG ASTUTI, S. Sos
Nip . 19950501 202012 2 001

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023

[illegible]

	- Pengadaan pakaian dinas lapangan	1. melakukan survey rekaman 2. melakukan pembelian pakaian dinas lapangan	Rp 155.320.000	
	- pengadaan rambu tidak bersuar (rambu jalur evakuasi, titik kumpul, dan papan informasi bencana)	1. melakukan survey rekaman 2. melakukan pembelian rambu tidak bersuar (rambu jalur evakuasi, titik kumpul, dan papan informasi bencana)		
4	Pengelolaan resiko bencana Kabupaten/kota - Penebangan /Pemangkasan Pohon	1. Pembentukan tim penebangan / Pemangkasan pohon 2. Rapat kerja tim terkait pelaksanaan penebangan / pemangkasan pohon 3. Menindaklanjuti surat permintaan penebangan / pemangkasan pohon 4. Pelaksanaan kegiatan penebangan / pemangkasan pohon 5. Pembuatan laporan kegiatan		



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)

Alamat : Jalan Muh. Krg Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **HERIYANTO, S.A.P**
Jabatan : **Penata Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana**
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANDI LAPANG, SP**
Jabatan : **Kasubag Keuangan Badan Penanggulangan Bencana**
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

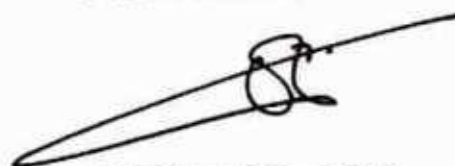
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 06 Februari 2023

Pihak Kedua,


ANDI LAPANG, SP.

Pihak Pertama,


HERIYANTO, S.A.P.

[illegible]


ANDI LAPANG, S.P.
NIP. 19681102 2006

HERYANTO, S.

HERIYANTO, S.A.P.
NIP. 19840914 20140



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini

Nama BAKRI BAHAR, S. Kom
Jabatan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
Bencana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama Dra. Hj. NURMIATI B
Jabatan Kasubag. Umum dan Kepegawaian Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 06 Februari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dra Hj. NURMIATI B.

BAKRI BAHAR, S. Kom.

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN ANALIS SDM APARATUR TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
				JAN	FEB	MAR	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1.	Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi penyusunan laporan di bidang kepegawaian	1. Mengumpulkan data dan bahan perencanaan kerja kepegawaian setiap tahun	Rp													100%
		2. Membuat perencanaan kerja kepegawaian setiap tahun														
		3. Mengelola kinerja pegawai														
		4. Menyusun dokumen penilaian sasaran kinerja pegawai														
		5. Membuat laporan pelaksanaan tugas setiap bulan														

Benteng, 06 Februari 2023

KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN,

ANALIS SDM APARATUR,


Dra. Hj. NURMIATI B.
NIP. 119680104 199603 2 003


BAKRI BAHAR, S. Kom.
NIP. 19770617 201001 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 - 21029

BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ABD RAHMAN NUR
Jabatan : Pengadministrasi Keuangan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDI LAPANG, SP.
Jabatan : Kasubag Keuangan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

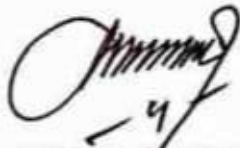
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 06 Februari 2023

Pihak Kedua,


ANDI LAPANG, SP.

Pihak Pertama,


ABD. RAHMAN NUR

**WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADMINISTRASI KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

[illegible]

[illegible]



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **TAUFIQ Z**
Jabatan : **Pengadministrasi Umum Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **M SYUKRI SALLATU, ST**
Jabatan : **Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Benteng, 06 Februari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

M. SYUKRI SALLATU, ST.

TAUFIQ. Z

[illegible][illegible]



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANDI RUDI KURNIAWAN**
Jabatan : **Pengadministrasi Umum Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **REY RIVALDI ALFONS, ST**
Jabatan : **Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 06 Februari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


REY RIVALDI ALFONS, ST.


ANDI RUDI KURNIAWAN

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

PROGRAM : PENANGGULANGAN BENCANA

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KELUARAN	HASIL	KET
1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	- Aplikasi Informasi pelaporan dan Pengaduan Bencana daerah	- Aplikasi Informasi pelaporan dan Pengaduan di google playstore	- tersedianya aplikasi informasi yang dapat diunduh di Google Playstore yang dapat diakses seluruh masyarakat di Kab. Kepulauan Selayar	
2	Penyusunan kajian resiko bencana Kabupaten/Kota	- dokumen kajian resiko bencana	- Jumlah Dokumen Kajian resiko bencana	- Tersedianya dokumen kajian resiko bencana	
3	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	- Pengadaan peralatan mesin - Pengadaan baju dinas lapangan	- Jumlah peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan yang telah tersedia - Jumlah pakaian dinas lapangan yang telah tersedia	- tersedianya peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana - tersedianya pakaian dinas lapangan	

		- Pengadaan rambu tidak bersuar (rambu jalur evakuasi, titik kumpul, dan papan informasi bencana)	- Jumlah rambu tidak bersuar (rambu jalur evakuasi, titik kumpul, dan papan informasi bencana) yang tersedia	- tersedianya rambu tidak bersuar (rambu jalur evakuasi, titik kumpul, dan papan informasi bencana)	
4	Pengelolaan resiko bencana Kabupaten/ Kota	Penebangan / pemangkasan pohon	Jumlah pohon yang ditebang/di pangkas yang berpotensi menimbulkan dampak bencana pohon tumbang	Tertanganinya pohon yang berpotensi menimbulkan bencana / pohon tumbang	
5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Pemasangan rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul, dan rambu informasi bencana pada daerah rawan bencana	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitas pencegahan dan kesiapsiagaan	Terpasangnya rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul, dan rambu informasi bencana pada daerah rawan bencana	

Mengetahui :
Kabid, Pencegahan & Kesiapsiagaan,

Rey Rivaldi Alfons S.T.

Pangkat : Penata Tk.I

Nip : 19870113 201101 1 009

Benteng, 06 Februari 2023

Pengadministrasi Umum

Andi Rudi Kurniawan

Nip : 19790717 200801 1 024

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023

[illegible]

- Pengadaan pakaian dinas lapangan - pengadaan rambu tidak bersuar (rambu jalur evakuasi, titik kumpul, dan papan informasi bencana)	1. melakukan survey rekanan 2. melakukan pembelian pakaian dinas lapangan								
	1. melakukan survey rekanan 2. melakukan pembelian rambu tidak bersuar (rambu jalur evakuasi, titik kumpul, dan papan informasi bencana)								
4 Pengelolaan resiko bencana Kabupaten/kota - Penebangan /Pemangkas Pohon	1. Pembentukan tim penebangan / Pemangkas pohon 2. Rapat kerja tim terkait pelaksanaan penebangan / pemangkas pohon 3. Menindaklanjuti surat permintean penebangan / pemangkas pohon 4. Pelaksanaan kegiatan penebangan / pemangkas pohon 5. Pembuatan laporan kegiatan	Rp 155.320.000							



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama **SUDARMIN SYAM**
Jabatan **Pengadministrasi Umum Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama **M SYUKRI SALLATU, ST.**
Jabatan **Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Benteng, 06 Februari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

M. SYUKRI SALLATU, ST.

SUDARMIN SYAM

[illegible]

1101

